

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)**

**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**TAHUN 2019-2023**



**“Sumatera Selatan Maju Untuk Semua”**

**KATA PENGANTAR**

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023.

Rencana Strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 yang berisi tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Sehubungan dengan adanya Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Sumsel Tahun 20219-2023, sehingga Rencana Strategis Perangkat Daerah yang merupakan turunan atau penjabaran dari RPJMD juga harus direview.

Mengusung Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan yaitu **Sumsel Maju untuk Semua** dan Misi ketiga yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas yang didukung aparatur pemerintahan yang jujur, berintegritas, profesional dan responsif, maka BPSDMD merupakan lembaga hulu dalam rangka meningkatkan kompetensi aparatur yang jujur, berintegritas, profesional dan responsif.

Untuk mewujudkan misi tersebut, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan menetapkan 2 tujuan yaitu mewujudkan sumber daya aparatur yang kompeten dan mewujudkan pengelolaan kelembagaan diklat yang sesuai dengan standar yang dijabarkan dalam program dan kegiatan prioritas Tahun 2019-2023.

Akhirnya, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dan membantu dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 ini, semoga rencana strategis dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam penyusunan kegiatan, sehingga terjadi harmonisasi dan keterpaduan langkah dalam mewujudkan aparatur yang berkompeten.

Palembang, Januari 2022

Kepala Badan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Daerah

Provinsi Sumsel,

Hj. TARBIYAH, S.Pd., M.M

PEMBINA UTAMA MADYA (IV/d)

NIP. 196410131984062001

**DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL i

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iv

DAFTAR GAMBAR vi

DAFTAR TABEL vii

BAB I PENDAHULUAN

* 1. Latar Belakang 1
  2. Landasan Hukum 2
  3. Maksud dan Tujuan 3
  4. Sistematika Penulisan 4

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

* 1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat

Daerah 6

* 1. Sumber daya Perangkat Daerah 16
     1. Data Susunan Kepegawaian 16
     2. Aset yang Dikelola 17
     3. Unit Usaha 19
  2. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 19
  3. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah 25

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

* 1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan

Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah 28

* 1. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 29

* + 1. Visi 29
    2. Misi 30
    3. Tujuan dan Sasaran 31
    4. Program Kepala Daerah 33
  1. Telaahan Rencana Strategis BPSDM Kementerian

Dalam Negeri 34

* 1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 37
  2. Penentuan Isu-isu Strategis 37

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN 40

4.1 Tujuan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan 41

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 46

* 1. Strategi 46
  2. Arah Kebijakan 47

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA

PENDANAAN 51

6.1 Program dan Kegiatan Tahun 2019-2020 51

6.2 Program dan Kegiatan Tahun 2021-2022 57

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 91

BAB VIII PENUTUP 93

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 4.1 Arsitektur Kinerja Pembangunan Daerah 40

Gambar 4.2 Hubungan Kinerja Pembangunan Daerah 41

**DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan 16

Tabel 2.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin 16

Tabel 2.3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan 17

Tabel 2.4 Komposisi Pegawai Berdasarkan Umur 17

Tabel 2.5 Jumlah Jabatan Struktural dan Fungsional 17

Tabel 2.6 Sarana dan Prasarana BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan 18

Tabel 2.7 Jumlah dan jenis diklat dalam 5 tahun terakhir 20

Tabel 2.8 Pencapaian Kinerja Pelayanan BPSDMD Provinsi

Sumatera Selatan 21

Tabel 2.9 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Provinsi Sumatera Selatan 24

Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas

dan Sasaran Perangkat Daerah 29

Tabel 3.2 Permasalahan P`elayanan BPSDMD Prov. Sumsel berdasarkan Tujuan Renstra BPSDM Kemendagri RI beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya 36

Tabel 4.3 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah 44

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan pada

Misi III RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun

2019-2023 46

Tabel 5.2 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan BPSDMD

Prov. Sumsel 49

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan

Perangkat Daerah BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan

Tahun 2019-2020 60

Tabel 6.2 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan

Perangkat Daerah BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan

Tahun 2021-2023 60

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu

pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 92

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang**

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan daerah, maka diperlukan suatu proses perencanaan agar pembangunan daerah dapat berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Definisi di atas sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Dokumen perencanaan yang perlu dibuat sebagai pedoman pemerintah daerah yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sedangkan dokumen perencanaan yang dibuat oleh Perangkat Daerah (PD) ialah Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja).

Rencana Strategis Perangkat Daerah disusun sebagai rencana kegiatan selama 5 (lima) tahun mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019–2023 yang merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Terpilih Periode 2019-2023.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat arah kebijakan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif serta dilengkapi dengan matriks indikasi program yang memiliki tujuan, sasaran dan program beserta indikator dan targetnya untuk masing-masing visi.

Rencana strategis merupakan dokumen perencanaan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Sumatera Selatan yang harus dijadikan rujukan agar tujuan pembangunan yang hendak dicapai dapat diukur karena merupakan salah satu faktor tolak ukur kinerja Kepala BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan.

* 1. **Landasan Hukum**

Rencana Strategis BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 disusun atas landasan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengembangan Sistem Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan 2019-2023.
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Sumsel Tahun 20219-2023
9. Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
   1. **Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Rencana Strategis BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 adalah menjabarkan visi dan misi serta program kerja BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 dalam sebuah dokumen perencanaan tahunan sekaligus penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan.

Sedangkan tujuannya adalah sebagai berikut :

1. Memberikan arah kebijakan perencanaan serta prioritas pembangunan yang dilaksanakan BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023.
2. Sebagai acuan berbagai pihak dalam menetapkan kebijakan pembangunan Tahun 2019-2023.
3. Memudahkan seluruh jajaran BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu terarah dan terukur.
4. Sebagai pedoman dalam pengawasan, pengendalian, pertanggungjawaban, dan evaluasi kinerja BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan.
5. Terciptanya Sinkronisasi dan Sinergitas pada jajaran BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan.
   1. **Sistematika Penulisan**

Dokumen Rencana Strategis BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 disajikan dengan Sistematika Penulisan sebagai berikut :

**BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini memuat latar belakang tentang gambaran umum potensi dan permasalahan bidang/lingkup yang menjadi tugas pokok Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan, selain itu dimuat landasan hukum, maksud dan tujuan, hubungan Renstra dengan dokumen perencanaan lainnya, serta uraian singkat tentang sistematika penyusunan renstra ini.

**BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Dalam bab ini memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah, dan tantangan serta peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan.

**BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Pada bab ini dipaparkan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaahan renstra K/L dan resntra, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis serta penentuan isu-isu strategis.

**BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

Pada bab ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan beserta indikator kinerjanya.

**BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Pada bab ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Sumatera Selatan dalam 5 (lima) tahun mendatang.

**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Pada bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

**BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

**BAB VIII PENUTUP**

Memuat tentang penegasan fungsi Renstra, yaitu berlaku sebagai acuan dan pedoman bagi segenap jajaran BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan serta sebagai referensi bagi semua pengguna dan stakeholder.

**LAMPIRAN**

Berisi tentang lampiran-lampiran yang dipandang perlu meliputi matriks-matriks, analisis-analisis, perhitungan-perhitungan serta peraturan perundangan yang relevan.

**BAB II**

**GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**

* 1. **Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan**

Tugas, fungsi, dan susunan organisasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut :

1. **Tugas**

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Gubernur tersebut di atas, Kepala Badan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang pengembangan sumber daya manusia aparatur

1. **Fungsi**

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Gubernur tersebut di atas menegaskan bahwa untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Badan mempunyai fungsi :

1. penyusunan kebijakan teknis dan perencanaan program pengembangan sumber daya manusia provinsi;
2. penyelenggaraan pengembangan kompetensi di lingkungan pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota;
3. penyelenggaraan sertifikasi kompetensi di lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota;
4. pengkoordinasian pengembangan kompetensi di lingkungan pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota;
5. pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia aparatur di provinsi dan kabupaten/kota;
6. pengkoordinasian penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah;
7. pelaksanaan administrasi BPSDMD; dan
8. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
9. **Struktur Organisasi**

Struktur Organisasi BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari :

Bagan 2.1

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROV. SUMSEL

**KEPALA BADAN**

**SEKRETARIAT**

Kelompok

Jabatan Fungsional

Subbagian Keuangan

Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Subbagian Umum dan Kepegawaian

**Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Umum Dan Fungsional**

**Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial**

**Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Inti**

**Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan**

Subbid Pengembangan Kompetensi Teknis Umum

Subbid Manajerial

Tingkat Tinggi

Subbid Jabatan Administrasi Pelayanan Dasar dan Pilihan

Subbid Sertifikasi Kompetensi

Subbid Pengembangan Kompetensi Teknis Pilihan

Subbid Manajerial

Tingkat Menengah

Subbid Jabatan Administrasi

Non-Pelayanan Dasar

Subbid Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi

Subbid jabatan Administrasi

Non-Pelayanan Dasar

Subbid Manajerial

Tingkat Dasar

Subbid Jabatan Administrasi Perangkat Daerah Penunjang

Subbid Pengelolaan Sumber Belajar dan Kerjasama

UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN

Susunan Organisasi BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan terdiri atas 1 orang pejabat eselon II, 5 orang pejabat eselon III dan 15 orang pejabat eselon IV, dengan tugas dan fungsi antara lain sebagai berikut :

* + 1. **Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada Kepala Badan, Bidang dan Subbidang di Lingkungan BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi :

1. penyusunan perencanaan, pemantauan, pengevaluasian, pelaporan program dan penganggaran pengembangan sumber daya manusia aparatur lingkup pemerintah provinsi;
2. pelaksanaan anggaran, perbendaharaan keuangan, serta pelaporan keuangan dan barang milik daerah;
3. pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, keamanan dalam, perlengkapan, pengelolaan aset dan dokumentasi;
4. pengelolaan administrasi kepegawaian, kehumasan dan pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara;
5. pengelolaan penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah; dan
6. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Untuk pelaksanaan fungsi tersebut, sekretariat terbagi dalam 3 sub bagian, antara lain :

1. Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan, yang mempunyai tugas
   * 1. menyiapkan perencanaan program dan kegiatan pengembangan sumber daya manusia;
     2. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pengembangan sumber daya manusia;
     3. melaksanakan pengolahan data dan sistem informasi pengembangan sumber daya manusia;
     4. melaksanakan penyusunan laporan kinerja program pengembangan sumber daya aparatur provinsi yang bersifat bulanan, triwulan, semester dan tahunan;
     5. mengkoordinasikan penyusunan jadwal rencana kegiatan tahunan diklat tingkat provinsi dan rencana kegiatan diklat yang akan dilaksanakan daerah kabupaten/kota;
     6. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, yang mempunyai tugas :
3. melaksanakan urusan administrasi surat menyurat, kearsipan dan expedisi;
4. melaksanakan urusan rumah tangga, perkantoran, asrama, pertamanan, lingkungan dan perpustakaan;
5. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, kehumasan, pembinaan jabatan fungsional, dan evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara;
6. menyiapkan sarana dan prasarana untuk pengembangan Sumber Daya manusia;
7. melaksankan pengelolaan pemakaian asrama, ruang belajar, aula, laboratorium, ruang makan, perpakiran dan fasilitas lainnya;
8. pengelolaan keamanan, kebersihan, dan keindahan lingkungan BPSDMD;
9. menyiapkan perhitungan kebutuhan barang, mengadakan, mendistribusikan dan memelihara barang inventaris kantor;
10. melakukan penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah;
11. melaksanakan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
12. melaksanakan pembayaran tagihan rekening telepon, listrik, air dan pajak kendaraan bermotor;
13. merencanakan penyediaan bahan referensi buku, majalah, tabloid, koran dan dan sumber bacaan;
14. melaksanakan pengaturan, menyimpan dan memelihara bahan-bahan perpustakaan;
15. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
16. Sub Bagian Keuangan yang mempunyai tugas antara lain :
17. merencanakan urusan anggaran dan perbendaharaan keuangan;
18. melaksanakan pengelolaan data perkembangan realisasi anggaran;
19. menyiapkan bahan verifikasi, validasi dan akuntansi penerbitan surat perintah membayar;
20. melaksanakan urusan akuntansi keuangan;
21. merencanakan laporan pengelolaan anggaran;
22. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan anggaran;
23. merencanakan pembuatan daftar pembayaran gaji/insentif/tunjangan kesejahteraan pegawai;
24. melaksanakan pengumpulan bahan dan pengelolahan data bidang keuangan;
25. melaksanakan pembukuan terhadap semua jenis pengeluaran;
26. melaksanakan penyusunan laporan pertanggung-jawaban keuangan secara berkala;
27. melaksanakan penghimpunan dan pendataan aset BPSDMD;
28. melaksanakan pengelolaan, penatausahaan dan pelaporan aset;
29. merencanakan anggaran rutin berkoordinasi dengan Subbagian Perencanaan;
30. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
    * 1. **Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan**

Berdasarkan Pasal 9 dan 10 Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sertifikasi kompetensi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, kelembagaan, tenaga pengembang kompetensi, sumber belajar, dan kerjasama antara lembaga.

Untuk melaksanan tugas tersebut, Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan mempunyai fungsi :

1. penyusunan kebijakan teknis dan rencana sertifikasi kompetensi, akreditasi, pengelolaan kelembagaan, tenaga pengembang kompetensi, sumber belajar dan kerjasama;
2. pengelolaan lembaga sertifikasi penyelenggara pemerintahan dalam negeri provinsi;
3. pelaksanaan sertifikasi kompetensi di lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota;
4. pengelolaan kelembagaan, tenaga pengembang kompetensi, dan sumber belajar;
5. penyusunan analisa kebutuhan pendidikan dan pelatihan;
6. pelaksanaan kerjasama antar lembaga, pendidikan formal, dan pendidikan kepamongprajaan;
7. pembinaan, pengkoordinasian, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan sertifikasi, pengelolaan kelembagaan dan tenaga pengembang kompetensi, pengelolaan sumber belajar, dan kerjasama; dan
8. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Untuk operasional fungsi-fungsi tersebut, Kepala Bidang dibantu oleh :

1. Kepala Subbidang Sertifikasi Kompetensi
2. Kepala Subbidang Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi
3. Kepala Subbidang Pengelolaan Sumber Belajar dan Kerjasama
   * 1. **Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Inti**

Berdasarkan Pasal 12 dan 13 Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Inti mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, perencanaan program/kegiatan, pelaksanaan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan kompetensi teknis inti.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Inti mempunyai fungsi :

1. penyusunan kebijakan teknis dan perencanaan program/kegiatan pengembangan kompetensi teknis inti;
2. penyusunan rencana standar perangkat pembelajaran pemerintahan dalam negeri kompetensi inti bagi jabatan administrasi penyelenggara urusan pemerintahan konkuren dan perangkat daerah penunjang;
3. penyelenggaraan pengembangan kompetensi inti bagi jabatan administrasi penyelenggara urusan pemerintahan konkuren dan perangkat daerah penunjang;
4. pembinaan, pengkoordinasian, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengembangan kompetensi inti bagi jabatan administrasi penyelenggara urusan pemerintahan konkuren dan perangkat daerah penunjang; dan
5. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Untuk operasional fungsi-fungsi tersebut, Kepala Bidang dibantu oleh :

1. Subbidang Jabatan Administrasi Urusan Pelayanan Dasar dan Pilihan
2. Subbidang Jabatan Administrasi Non-Pelayanan Dasar
3. Subbidang Jabatan Administrasi Perangkat Daerah Penunjang
   * 1. **Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Umum dan Fungsional**

Berdasarkan Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Umum dan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, perencanaan program/kegiatan, pelaksanaan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan kompetensi umum dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggara urusan konkuren, dan penyelenggara urusan pemerintahan umum, serta jabatan fungsional.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Umum Dan Fungsional mempunyai fungsi :

1. penyusunan kebijakan teknis dan perencanaan program/kegiatan pengembangan kompetensi teknis umum, pilihan, dan urusan pemerintahan umum bagi jabatan administrasi, serta jabatan fungsional;
2. penyusunan standar perangkat pembelajaran pemerintahan dalam negeri kompetensi umum, pilihan, urusan pemerintahan umum bagi jabatan administrasi, dan jabatan fungsional;
3. penyelenggaraan pengembangan kompetensi umum, pilihan, serta urusan pemerintahan umum bagi jabatan administrasi dan jabatan fungsional; dan
4. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Untuk operasional fungsi-fungsi tersebut, Kepala Bidang dibantu oleh :

* 1. Subbidang Pengembangan Kompetensi Teknis Umum
  2. Subbidang Pengembangan Kompetensi Teknis Pilihan
  3. Subbidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional
     1. **Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial**

Berdasarkan Pasal 18 dan Pasal 19 Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Bidang Kompetensi Manajerial mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, perencanaan program/kegiatan, pelaksanaan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan kompetensi pimpinan Tingkat Tinggi, jabatan pimpinan Tingkat Menengah, dan Jabatan Pimpinan Tingkat Dasar.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Kompetensi Manajerial mempunyai fungsi :

1. penyusunan kebijakan teknis dan perencanaan program/kegiatan pengembangan pimpinan Tingkat Tinggi, jabatan pimpinan Tingkat Menengah, dan Jabatan Pimpinan Tingkat Dasar;
2. penyusunan standar perangkat pembelajaran pemerintahan dalam negeri bagi pimpinan Tingkat Tinggi, jabatan pimpinan Tingkat Menengah, dan Jabatan Pimpinan Tingkat Dasar;
3. pelaksanaan seleksi/rekrutmen calon peserta diklat kompetensi jabatan manajerial;
4. penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi pimpinan Tingkat Tinggi, jabatan pimpinan Tingkat Menegah, dan Jabatan Pimpinan Tingkat Dasar;
5. pembinaan, pengkoordinasian, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengembangan kompetensi pimpinan Tingkat Tinggi, jabatan pimpinan Tingkat Menegah, dan Jabatan Pimpinan Tingkat Dasar; dan
6. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Untuk operasionalisasi fungsi-fungsi tersebut, kepala Bidang Kompetensi Manajerial dibantu oleh :

1. Subbidang Manajerial Tingkat Tinggi
2. Subbidang Manajerial Tingkat Menengah
3. Subbidang Manajerial Tingkat Dasar
   1. **Sumber Daya Perangkat Daerah**
      1. **Data Susunan Kepegawaian**

Keadaan Pegawai Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan per 1 Januari 2022 terdiri dari :

* 1. PNS : 80 orang
  2. Tenaga Honorer : 37 orang

**Total : 117 orang**

Dari 80 PNS dapat diuraikan sesuai masing-masing formasi sebagai berikut :

**Tabel 2.1**

Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Tingkat Pendidikan** | **Jumlah** | **Persentase (%)** |
| 1  2  3  4  5 | S3  S2  S1  D3  SMA | 9  39  20  -  12 | 11 %  50 %  3 %  -  15 % |
|  | **Jumlah** | **80** | **100** |

**Tabel 2.2**

Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Jenis Kelamin** | **Jumlah** | **Prosentase** |
| 1 | Laki-laki | 43 | 59 % |
| 2 | Perempuan | 37 | 41 % |
|  | **Jumlah** | **80** | **100** |

**Tabel 2.3**

**Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Golongan** | **Jumlah Pegawai** | **Persentase (%)** |
| 1  2  3 | IV  III  II | 45  43  12 | 45  43  12 |
|  | **Jumlah** | **100** | **100,00** |

**Tabel 2.4**

**Komposisi Pegawai Berdasarkan Umur**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Umur** | **Jumlah Pegawai** | **Persentase (%)** |
| 21-30 tahun  31-40 tahun  41-50 tahun  51-60 tahun  >60 tahun | 3  25  30  40  2 | 3%  25%  30%  40%  2% |
| **Jumlah** | **100** | **100,00** |

**Tabel 2.5**

**Jumlah Jabatan Struktural dan Fungsional**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Jabatan Struktural | | | Jabatan Fungsional |
| Eselon  II | Eselon  III | Eselon  IV |
| 1 | 1 | 5 | 15 | 33 |

* + 1. **Aset yang Dikelola**

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya memiliki berbagai sarana dan prasarana. Adapun sarana prasarana untuk menunjang kegiatan Kediklatan pada BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan seperti tabel berikut :

**Tabel 2.6**

**Sarana dan Prasarana BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Sarana dan Prasarana** | **Gedung/Ruangan** | | **Kapasitas Keseluruhan** |
| **Jumlah** | **Fasilitas** |
| 1 | Gedung Administrasi | 1 unit (2 lantai) | AC, Soundsystem, Meubelair | - |
| 2 | Gedung Widyaiswara dan Perpustakaan | 1 unit (2 lantai) | AC, Soundsystem, Meubelair |  |
| 3 | a. Aula Putri Kembar Dadar  b. Aula Hulu Balang | 1 Unit  1 Unit | AC, Sound System Lengkap  SDA | 200 Kursi  80 kursi |
| 4 | Ruang Belajar | 7 kelas | 7 Ruang AC | 280 orang |
| 5 | Laboratorium bahasa dan Lab. Komputer | 2 kelas | AC, Sound Sistem, Proyektor | 80 orang |
| 6 | Asrama/ Penginapan | 71 Kamar | AC/kipas angin | 211 orang |
|  | * 1. Asrama Putri Rambut Selako | 10 kamar | 2 orang per kamar | 20 orang |
|  | * 1. Asrama Mayang Sari | 15 kamar | 5 orang per kamar | 75 orang |
|  | * 1. Asrama Bagus Kuning | 12 Kamar | 3 orang per kamar | 36 orang |
|  | * 1. Asrama Batuapi | 11 kamar | 3 orang per kamar | 33 orang |
|  | * 1. Asrama Dapuntahyang | 12 kamar | 2 orang per kamar | 24 orang |
|  | * 1. Asrama Tuan Junjungan | 11 kamar | 6 kamar kapasitas @3 orang, 5 kamar @1 orang/kamar | 23 orang |
| 7 | Paviliun/Mess | 1 Unit | 6 Kamar AC | 12 orang |
| 8 | Ruang Makan | 4 Unit | Meja dan Kursi | 280 Orang |
| 9 | Klinik / Balai Pengobatan | 1 Unit | Type 36  2 Orang T.Medis  2 Mobil Ambulan | 2 Kamar Tidur |
| 10 | Masjid | 1 Unit | 1 Unit | 300 Orang |
| 11 | Rumah Dinas | 2 Unit | 2 Unit | Type 36 dan 54 |
| 12 | Gedung Koperasi | 1 Unit | Waserba/Kantin | 20 |
| 13 | Ruang Perpustakaan | 1 Unit | 24 Meja dan Kursi | 24 |
| 14 | Lap.Tenis | 1 Unit | 2 band | - |
| 15 | Lapangan Badminton | 1 unit | 1 Band | - |
| 16 | Tennis Meja | 2 Unit | 2 Meja | - |
| 17 | Kendaraan Dinas :  Roda 2  Roda 4 | 7 Unit  9 Unit |  | Minibus 6 Unit  Ambulan 2 Unit  Pick Up 1 Unit |

* + 1. **Unit Usaha**

BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan memiliki unit usaha berupa Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) yang didirikan berdasarkan Badan Hukum Nomor 00313/BH/KWK.6/VI/1996 Tanggal 3 Juni 1996, dengan dokumen pendukung antara lain :

* + 1. SIUP Nomor 280/kpts/SIUP-PK/2010 Tanggal 9 Februari 2010
    2. SITU Nomor 503/IG.R/5982/KPPT/2013 Tanggal 5 September 2013
    3. NPWP Nomor 01.780.471.7.307.000
    4. TDP Nomor 060626500638 Tanggal 9 Februari 2010

Dengan jumlah anggota per 31 Desember 2013 sebanyak 109 orang, bidang usaha yang dijalankan yaitu :

1. simpan-pinjam
2. usaha lain-lain
3. kerjasama usaha fotocopy
4. kantin
5. warung serba ada

Sumber permodalan berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela dari anggota.

* 1. **Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Kiprah BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan dari Tahun 2014 s.d 2018 telah melakukan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur sebanyak 4.998 orang, yang meliputi pengembangan kompetensi teknis, fungsional, pemerintahan dan politik serta manajerial/kepemimpinan.

Pada Tahun 2014, BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan kegiatan diklat sebanyak 19 jenis diklat (22 angkatan) dengan total peserta berjumlah 810 orang, Tahun 2015 melaksanakan kegiatan diklat 17 jenis diklat (22 angkatan) dengan total jumlah peserta 884 orang dan pada Tahun 2016 melaksanakan 12 jenis diklat (18 angkatan) dengan total jumlah peserta 727 orang, Tahun 2017 melaksanakan kegiatan kediklatan dengan jumlah peserta sebanyak 1308 orang dan Tahun 2018 melaksanakan kegiatan kediklatan dengan jumlah peserta diklat 1.269 orang.

Rincian jumlah dan jenis diklat dalam 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.7

Jumlah dan jenis diklat dalam 5 tahun terakhir

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Jenis diklat** | **Jumlah Peserta Diklat (orang)** | | | | | **Jumlah** |
| **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| 1 | Diklat Manajerial | 427 | 725 | 636 | 755 | 2382 | 4925 |
| 2 | Diklat Teknis Umum dan Fungsional | 747 | 369 | 248 | 40 | 357 | 1761 |
| 3 | Diklat Teknis Inti | 30 | 126 | 815 | 40 | 110 | 1121 |
| 4 | Sertifikasi dan Uji Kompetensi | 104 | 49 | 265 | 35 | 442 | 895 |
|  | **JUMLAH** | **1308** | **1269** | **1964** | **890** | **3291** | **8702** |

**Tabel T-C 23**

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Indikator Kinerja | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke- | | | | | Realisasi capaian Tahun ke - | | | | | Rasio Capaian pada Tahun ke- | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 1 | Jumlah aparatur yang berkompeten | - | - | 3360 orang | 780 | 680 | 710 | 640 | 690 | 752 | 884 | 727 | 1308 | 1269 | 96,41 | 130,00 | 102,39 | 204,38 | 183,91 |
| 2 | Jumlah widyaiswara yang berkompeten | - | - | 40 orang | 24 | 30 | 34 | 37 | 40 | 24 | 27 | 34 | 32 | 32 | 100,00 | 90,00 | 100,00 | 88,49 | 80,00 |

Secara keseluruhan kinerja BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hasil pencapaian kinerja dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir ditunjukkan dengan indikator pencapaian dari target RPJMD BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan yang terus tercapai bahkan melebihi dari target.

Dari kedua indikator kinerja pada RPJMD tersebut diatas terlihat adanya peningkatan capaian kinerja BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan. Peningkatan kinerja ini tidak terlepas dari upaya yang dilakukan oleh seluruh pihak terkait di Lingkungan BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan untuk sungguh-sungguh terus mengupayakan peningkatan kualitas pelayanan kediklatan yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) ataupun masyarakat.

Guna meningkatkan pelayanan dalam pengembangan Sumber Daya Manusia, BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2017 mulai menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 201/KPTS/BPKAD/2017 Tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Dari sisi pelayanan kediklatan yang diberikan oleh BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan tidak hanya melakukan peningkatan kualitas terhadap pelayanan diklat dari internal saja tetapi juga sudah mulai melakukan kerja sama dengan pihak lainnya seperti Ditjen Pendidikan Tinggi, Lembaga Adminsitrasi Negara dan Lembaga lainnya. Dukungan fasilitas yang lebih lengkap untuk pelayanan kediklatan jika dibandingkan dengan Badan Pengembangan SDM lainnya, termasuk pelayanan penunjang seperti laboratorium bahasa dan komputer. BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan memiliki lahan yang cukup luas dan sarana prasarana gedung dan letak geografisnya berada ditengah kota yang mudah dijangkau oleh kendaraan umum, sehingga menjadi pusat rujukan untuk Pengembangan SDM Daerah.

Agar pengembangan BPSDMD Provinsi Sumsel dapat berjalan dengan baik, maka perlu disusun prioritas pengembangan bagi bidang-bidang pelayanan yang dianggap potensial untuk meningkatkan jumlah customer yang akan berdampak terhadap peningkatan pendapatan operasional Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah.

**Tabel TC. 24**

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah**

**Provinsi Sumatera Selatan**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Uraian** | **Anggaran pada Tahun ke-**  **(Rp. 000,-)** | | | | | **Realisasi Anggaran pada Tahun ke-**  **(Rp. 000,-)** | | | | | **Rasio antara Realisasi dan Anggaran**  **Tahun ke- (%)** | | | | | **Rata-rata Pertumbuhan** | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Anggaran | Realisasi |
| **Sumber Dana APBD** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Belanja Tidak langsung | 12.417.557 | 12.249.531 | 10.222.609 | 8.295.789 | 12.732.527 | 11.913.135 | 12.176.776 | 10.204.169 | 8.199.531 | 11.451.20 | 95,94 | 99,41 | 99,82 | 98,84 | 89,94 |  |  |
| Belanja Langsung | 20.240.336 | 25.335.976 | 12.415.743 | 4.632.975 | 3.137.125 | 17.163.209 | 21.147.105 | 12.317.945 | 4.330.349 | 2.911.579 | 84,80 | 83,47 | 99,21 | 93,47 | 92,81 |  |  |
| **Jumlah APBD** | **32.657.893** | **37.585.507** | **22.638.352** | **12.928.764** | **15.869.652** | **29.076.344** | **33.323.882** | **22.522.114** | **12.529.880** | **14.362.780** | **89,03** | **88,66** | **99,49** | **96,91** | **90,50** |  |  |
| **Sumber Dana BLUD** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Belanja langsung |  |  |  | 7.851.340 | 12.849.982 |  |  |  | 7.247.281 | 12.096.107 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,31 | 94,13 |  |  |
| **Jumlah BLUD** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL APBD + BLUD** | **32.65 x 7.893** | **37.585.507** | **22.638.352** | **20.780.104** | **28.719.634** | **29.076.344** | **33.323.882** | **22.522.114** | **19.777.161** | **26.458.887** | **89,03** | **88,66** | **99,49** | **95,17** | **92,13** |  |  |

* 1. **Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, bahwa setiap PNS berhak untuk mengembangkan kompetensinya selama 20 Jam Pelajaran per tahun. Pengembangan Kompetensi tersebut dapat dilaksanakan melalui Pendidikan dan Pelatihan, seminar, kursus, penataran, praktik kerja di instansi lain serta pertukaran antara pegawai negeri sipil dengan pegawai swasta. Oleh karena itu, BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan mempunyai posisi dan peran yang penting dalam meningkatkan kompetensi pegawai.

BPSDMD harus mampu mewujudkan tiga kompetensi pegawai yang dipersyaratkan dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, yaitu teknis, manajerial dan sosial kultural. Indikator tiap kompetensi secara jelas dijabarkan dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Kompetensi teknis, misalnya, diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan pengalaman kerja secara teknis. Sedangkan kompetensi manajerial diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen dan pengalaman kepemimpinan. Terakhir, kompetensi sosial kultural diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.

Tantangan yang dihadapi oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka pengembangan pemberian pelayanan dalam rangka pengembangan kompetensi antara lain :

1. Belum adanya pengembangan sistem informasi kediklatan

Keterbatasan penggunaan teknologi sistem informasi terutama yang berbasis *web* atau *online* menjadi tantangan tersendiri bagi BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan, sehingga mulai Tahun 2019 BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan akan mengembangkan aplikasi sistem informasi kediklatan berbasis *web* yang nantinya akan terus dikembangkan untuk menjawab tantangan pelaksanaan pelatihan dengan menggunakan *e-learning.*

1. Adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018

Pada Tahun 2017, tepatnya tanggal 17 Maret 2017 BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan mulai menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 201/KPTS/BPKAD/2017 tentang Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah yang isinya berdampak secara signifikan terhadap keberadaan PPK BLUD Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan, dimana dalam Permendagri tersebut mengharuskan Perangkat Daerah yang menerapkan PPK BLUD harus berupa Unit Kerja Dinas/Badan, sehingga Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan harus membentuk Unit Kerja atau Unit Pelaksana Teknis Badan untuk melaksanakan PPK BLUD dimaksud.

1. Akreditasi dan Sertifikasi Diklat

Akreditasi dan sertifikasi diklat dari instansi Pembina diklat adalah hal yang wajib sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan bahwa Pelaksanaan Pelatihan Teknis, Fungsional, Sosiokultural dan Pelatihan Kepemimpinan dilaksanakan oleh Lembaga Pelatihan terakreditasi.

1. BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan telah terakreditasi oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI) untuk menyelenggarakan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III dengan Akreditasi A, Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV dengan Akreditasi B dan Pelatihan Dasar CPNS dengan Akreditasi B. Selanjutnya BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan akan terus meningkatkan status akreditasi baik kualitas maupun kuantitas dari akreditasi, baik untuk Pelatihan Kepemimpinan maupun diklat teknis dan fungsional lainnya.
2. Keterbatasan anggaran untuk melaksanakan pengembangan kompetensi.

Mengingat tingginya kebutuhan untuk pengembangan kompetensi ASN sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS yang mengamanatkan setiap PNS harus mengembangkan kompentensinya minimal 20 Jam Pelajaran/orang/tahun sehingga anggaran yang diperlukan tidak sedikit.

1. Masih Adanya Ego Sektoral dalam Penyelenggaraan Diklat

Penyelenggaraan diklat melibatkan beberapa komponen pokok yaitu adanya sarana dan prasarana, program, penyelenggara dan pengajar serta dukungan dana. Di lingkungan Provinsi dan Kab/Kota masih banyak Perangkat Daerah yang belum memenuhi hal tersebut, namun tetap untuk memaksakan diri untuk melaksanakan penyelenggaraan Diklat, yang mengakibatkan mutu, tujuan dan sasaran Diklat tidak tercapai sesuai yang diharapkan.

1. Tingginya kompetisi antar lembaga diklat

Persaingan antar lembaga diklat cukup kompetitif dalam menyediakan sarana prasarana diklat, SDM Penyelenggara Diklat serta Penyelenggaraan

1. Kurangnya Tenaga Pengajar Bidang Teknis Fungsional

Terbatasnya tenaga pengajar/pengampu mata diklat pada Bidang Teknis Fungsional karena substansi materi yang sangat teknis.

**BAB III**

**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**

**PERANGKAT DAERAH**

* 1. **Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Permasalahan terjadi karena adanya kesenjangan antara kondisi yang diharapkan (kondisi ideal) dengan kondisi realitas yang ada. Kondisi ideal pengembangan kompetensi ASN telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang mengamanatkan bahwa Pengembangan Kompetensi adalah hak dari setiap ASN, dan setiap PNS berhak untuk Pengembangan Kompetensi setiap PNS paling sedikit 20 Jam Pelajaran/orang/tahun.

Untuk mewujudkan hal tersebut, BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan yang merupakan lembaga hulu dalam pengembangan Sumber Daya Manusia harus terus berinovasi dan mengembangkan layanan pengembangan SDM guna menjawab tantangan tersebut. Salah satu usaha peningkatan pelayanan pengembangan SDM yang telah dilaksanakan oleh BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan adalah dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dengan beberapa Fleksibilitas yang diberikan melalui BLUD, sehingga pengembangan kompetensi ASN akan lebih cepat, efektif dan efisien.

Disamping itu, guna mewujudkan amanat dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan memerlukan dukungan sarana dan prasarana yang representatif serta SDM kediklatan baik tenaga pengelola, penyelenggara maupun widyaiswara yang kompeten.

Tabel T.C 3-5

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Perangkat Daerah

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Masalah pokok** | **Masalah** | **Akar Masalah** |
| 1 | Kompetensi PNS belum optimal | Adanya kesenjangan antara kompetensi ASN yang dibutuhkan dan kompetensi yang yang ada | Kesempatan mengikuti pengembangan kompetensi terbatas |
| belum semua penyelenggaraan diklat berdasarkan analisis kebutuhan diklat |
| Kurangnya motivasi ASN untuk mengikuti pengembangan kompetensi |
| 2 | Pengelolaan Kelembagaan belum optimal | sarana dan prasarana belum representatif | Kurangnya SDM pengelola sarana prasarana |
| Kurangnya pemanfaatan teknologi informasi |
| SDM kediklatan belum memadai | kesempatan mengikuti pengembangan kompetensi terbatas |
| belum semua jenis diklat terakreditasi | kerjasama dengan instansi pembina diklat belum optimal |

* 1. **Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah**

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagai lembaga hulu dalam peningkatan kompetensi SDM aparatur daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tidak terlepas dari visi, misi dan program kepala daerah terpilih. Adapun visi, misi dan Program Prioritas Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 yaitu:

* + 1. **Visi**

Dengan mempertimbangkan kemajuan yang telah dicapai pada periode 2013-2018, memperhatikan hasil analisis isu strategis, mengacu visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur untuk masa bhakti 2019-2023, mengikuti prioritas pembangunan RPJPD Provinsi Sumatera Selatan 2005-2025, memperhatikan prioritas pembangunan nasional, merujuk pada tujuan nasional yang tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, serta memperhatikan tujuan pembangunan millenium, maka visi pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 adalah: ***SUMSEL MAJU UNTUK SEMUA***.

Penjelasan visi pembangunan Sumatera Selatan 2019-2023 sebagai berikut:

* + - * Keadaan dimana terwujudnya pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan atau pembangunan berkelanjutan dan pembangunan maritim yang merata dan berkeadilan, dimana hasil-hasil pembangunannya dinikmati seluruh anggota masyarakat.
      * Kondisi dimana meningkatnya kualitas SDM yang menjunjung tinggi nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, kejujuran, integritas dan kearifan lokal, disamping terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat dengan dukungan anggaran pro-rakyat, prolingkungan dan pro-gender yang transparan dan akuntabel.
      * Kondisi tercapainya pelayanan publik yang baik dengan dukungan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas KKN, serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses penentuan kebijakan pembangunan yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
      * Terwujudnya rasa aman dan nyaman bagi kehidupan masyarakat sehingga anggota masyarakat dapat menjalankan aktivitas keagamaan, terciptanya kehidupan masyarakat yang menghargai perbedaan dan masyarakat dapat menikmati kesenian yang bermutu di pusat-pusat kebudayaan.
    1. **Misi**

Berdasarkan visi pembangunan yang telah ditetapkan, misi pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut:

* 1. Membangun Sumsel berbasis ekonomi kerakyatan, yang didukung sektor pertanian, industri, dan UMKM yang tangguh untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan baik di perkotaan maupun di perdesaan.
  2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), baik laki-laki maupun perempuan, yang sehat, berpendidikan, profesional, dan menjunjung tinggi nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, kejujuran, dan integritas. Meningkatkan Pemerataan yang Berkeadilan.
  3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas yang didukung aparatur pemerintahan yang jujur, berintegritas, profesional, dan responsif.
  4. Membangun dan meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur, termasuk infrastruktur dasar guna percepatan pembangunan wilayah pedalaman & perbatasan, untuk memperlancar arus barang dan mobilitas penduduk, serta mewujudkan daya saing daerah dengan mempertimbangkan pemerataan dan keseimbangan daerah.
  5. Meningkatkan kehidupan beragama, seni, dan budaya untuk membangun karakter kehidupan sosial yang agamis & berbudaya, dengan ditopang fisik yang sehat melalui kegiatan olahraga, sedangkan pengembangan pariwisata berorientasi pariwisata religius.
     1. **Tujuan dan Sasaran**

Berdasarkan visi dan misi pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023, maka tujuan dan sasaran dalam RPJMD yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut:

**Misi 1: “Membangun Sumsel berbasis ekonomi kerakyatan, didukung sector pertanian, industri, dan UMKM yang tangguh untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan baik di perkotaan maupun di perdesaan”.**

Tujuan 1 : Meningkatnya perekonomian yang inklusif berbasis inovasi daerah

Sasaran :

Meningkatnya Ekonomi Kerakyatan (Maju Ekonomi Kerakyatan)

Meningkatnya Investasi, Industri, dan Perdagangan (Maju Investasi, Industri, dan Perdagangan)

Meningkatnya Kesejahteraan Petani dan Kedaulatan Pangan (Maju Pertanian Rakyat dan Kedaulatan Pangan)

Menurunnya Pengangguran dan Kemiskinan (Maju Kesejahteraan Masyarakat)

Meningkatnya Akses Energi (Maju Akses Energi)

**Misi 2: “Meningkatkan kualitas SDM, baik laki-laki maupun perempuan, yang sehat, berpendidikan, profesional, dan menjunjung tinggi nilai keimanan, ketaqwaan, kejujuran, dan integritas”.**

Tujuan 2 : Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia

Sasaran :

* + - 1. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (Maju Kesehatan Masyarakat)
      2. Meningkatnya Akses Pendidikan Berkualitas (Maju Akses Pendidikan Berkualitas)

Tujuan 3 : Meningkatnya Kesetaraan dan Keadilan Gender

Sasaran :

Meningkatnya Pembangunan Gender dan Perlindungan Anak (Maju Pembangunan Responsif Gender dan Perlindungan Anak)

**Misi 3: “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas KKN dengan**

**mengedepankan transparansi dan akuntabilitas yang didukung aparatur pemerintahan yang jujur, berintegritas, profesional, dan responsif”.**

Tujuan 4 : Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan

Sasaran :

* + - 1. Meningkatnya Pelayanan Publik Berkualitas (Maju Pelayanan Publik Berkualitas)
      2. Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas (Maju Pembangunan yang Transparan dan Akuntabel)
      3. Meningkatnya Profesionalisme dan Integritas Aparatur Pemerintah Daerah (Maju Aparatur Profesional dan Berintegritas)

**Misi 4: “Membangun dan meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur, termasuk infrastruktur dasar guna percepatan pembangunan wilayah pedalaman dan perbatasan, memperlancar arus barang dan mobilitas penduduk, serta mewujudkan daya saing daerah dengan mempertimbangkan pemerataan dan keseimbangan daerah”.**

Tujuan 5 : Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Berkelanjutan

Sasaran :

* + - 1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup (Maju Kualitas Lingkungan Hidup)
      2. Meningkatnya Akses Pelayanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas (Maju Infrastruktur dan Konektivitas)

**Misi 5 : “Meningkatkan kehidupan beragama, seni, dan budaya untuk membangun karakter kehidupan sosial yang agamis dan berbudaya, ditopang fisik yang sehat melalui kegiatan olahraga, dan pengembangan**

**pariwisata berorientasi pariwisata religius”.**

Tujuan 6 : Terwujudnya Masyarakat Madani

Sasaran :

Mewujudkan Kestabilan Keamanan, Ketertiban dan Kehidupan Beragama yang Berkualitas (Maju Stabilitas Keamanan, Ketertiban dan Kehidupan Beragama)

Tujuan 7 : Meningkatnya Daya Saing Pariwisata Daerah melalui Seni, Budaya, dan Religi

Sasaran :

Meningkatnya Seni, Budaya, dan Pariwisata (Maju Seni, Budaya, dan Pariwisata)

Tujuan 8 : Meningkatnya Daya Saing Pemuda dan Olahraga

Sasaran :

Meningkatnya Pembangunan Pemuda dan Olahraga (Maju Pemuda dan Olahraga)

* + 1. **Program Kepala Daerah**

Penjabaran visi, misi dan tujuan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 dirumuskan dalam 8 (delapan) prioritas pembangunan daerah, antara lain sebagai berikut:

* + 1. Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Pengurangan Kemiskinan
    2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
    3. Peningkatan Kesetaraan dan Keadilan Gender
    4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan
    5. Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan
    6. Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Madani
    7. Peningkatan Daya Saing Pariwisata, Seni dan Budaya
    8. Peningkatan Daya Saing Pemuda dan Olahraga

Dari penjabaran visi, misi, tujuan dan sasaran serta program prioritas Pemerintah Provinsi Sumsel tahun 2019-2023, BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan tupoksinya mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang pengembangan sumber daya manusia aparatur, untuk itu BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan mendukung Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih yaitu Tujuan ke-4 yaitu **Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan** dan sasaran ke-11 yaitu **Maju Aparatur yang Profesional dan Berintegritas** dan program prioritas daerah Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan.

* 1. **Telaahan Rencana Strategis BPSDM Kementerian Dalam Negeri**

Sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Renstra Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan perlu dilakukan sinkronisasi dengan Renstra BPSDM Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

* + 1. **Visi**

Visi Renstra Badan Pengembagan Sumber Daya Manusia Kemendagri RI yaitu **“Terdepan Dalam Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Aparatur Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah”.**

* + 1. **Misi**

Misi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri RI yaitu :

1. Mengembangkan Program Diklat.
2. Meningkatkan Kapasitas SDM Tenaga Kediklatan.
3. Meningkatkan Koordinasi dan Kerjasama Kediklatan.
4. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Sarana dan Prasarana Diklat.
5. Melakukan Reformasi Diklat untuk Meningkatkan Kualitas Pengelolaan dan Penyelenggaraan Diklat.
6. Memanfaatkan Teknologi Komunikasi dan Informasi.
7. Melaksanakan Diklat.
   * 1. **Strategi**

Penetapan cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan faktor terpenting dalam proses perencanaan strategik. Cara mencapai tujuan dan sasaran atau strategi merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemendagri. Cara dimaksud dapat berupa penetapan kebijakan dan program operasional dengan memperhatikan sumber daya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi. Strategi merupakan terjemahan pemikiran kepada tindakan yang diarahkan pada penyelenggaraan operasional sehari-hari dari seluruh jajaran Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemendagri. Adapun strategi yang ditetapkan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemendagri dalam melaksanakan misinya sebagai berikut :

* Kemitraan

Dilaksanakan dengan memberikan peluang yang lebih besar bagi keterlibatan komponen-komponen di luar lembaga diklat dan di luar instansi pemerintah dalam pengembangan berbagai program kediklatan.

* Pengembangan Kelembagaan

Dilaksanakan agar lembaga-lembaga kedklatan mampu menjadi lembaga yang profesional dalam tataran desain organisasi, tataran sistem dan mekanisme kerjanya.

* Pengembangan Kapasitas Personil Diklat

Dilaksanakan untuk meningkatkan profesionalisme lembaga diklat melalui upaya peningkatan profesionalisme kediklatan bagi segenap jajaran personil di lembaga diklat.

* Swadana

Dilaksanakan dengan cara pengembangan pola pendamping yang memungkinkan lembaga-lembaga diklat dan unit-unit kerja pemerintah dapat bekerja lebih dinamis dan kreatif. Untuk itu strategi pembiayaan program diklat dengan pola swadana semakin penting untuk dikembangkan.

**Tabel 3.2**

**Permasalahan Pelayanan BPSDMD Prov. Sumsel berdasarkan Tujuan Renstra BPSDM Kemendagri RI beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Tujuan Renstra Badan Pengembangan SDM Kemendagri RI | Permasalahan Pelayanan Badan Pengembangan SDM Daerah Prov. Sumsel | Sebagai Faktor | |
| Penghambat | Pendorong |
| 1 | Meningkatkan koordinasi dan kerjasama kediklatan  dengan lembaga pemerintah, lembaga swasta dan  lembaga lainnya di dalam dan luar negeri untuk  kelancaran dan kualitas penyelenggaraan diklat. | Lemahnya koordinasi penyelenggaraan Diklat | Masih adanya ego sektoral dalam penyelenggaraan diklat di masing-masing OPD Provinsi | * + - 1. Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2016 tentang Tupoksi BPSDMD Prov. Sumsel       2. Adanya kebijakan diklat satu pintu (SE Gub. Sumsel Nomor 012/0330/SE/ Bandiklat/2015) |
| 2 | Meningkatkan kuantitas, kualitas dan kualifikasi pejabat  fungsional widyaiswara/tenaga pengajar dan tenaga  fungsional lainnya untuk mendukung pembelajaran yang  berkualitas. | Kurangnya tenaga pengajar (Widyaiswara) di bidang teknis dan fungsional | kurangnya pelatihan widyaiswara di bidang teknis dan fungsional | Kerjasama (MoU) dengan pihak/lembaga teknis terkait |
| 3 | Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan  prasarana diklat untuk mendukung kelancaran dan  kualitas penyelenggaraan diklat dengan pemanfaatan  teknologi komunikasi dan informasi. | Kualitas sarana dan standar penyelenggaraan diklat belum memadai | penganggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana kediklatan sesuai standar masih terbatas | lahan BPSDMD cukup luas (41.125 m2) |
| Kurangnya sistem Teknologi informasi (IT) dan media pembelajaran | Kurangnya sosialisasi penggunaan Teknologi informasi (IT) | Sudah adanya jaringan Teknologi informasi (IT) |

* 1. **Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Letak BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan terletak di posisi strategis yang sudah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Penempatan Kantor dan Asrama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan sudah berdasarkan pada kondisi dan suasana yang dibutuhkan dalam terselenggaranya kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan berada jauh dari kebisingan dan pusat perkantoran Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sehingga peserta diklat dapat mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan baik.

* 1. **Penentuan Isu-isu Strategis**

Pengembangan BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan Provinsi Sumatera Selatan tentunya dihadapkan dengan berbagai masalah dan tantangan yang akan berpengaruh terhadap hasil yang akan diperoleh. Berbagai masalah dan tantangan yang perlu mendapatkan perhatian dalam pengembangan BPSDMD tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

* + - 1. Adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dimana peningkatan kompetensi ASN merupakan hak dari setiap ASN dan dimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ditegaskan bahwa setiap PNS berhak untuk pengembangan kompetensi paling sedikit 20 Jam Pelajaran/orang/tahun sehingga hal tersebut merupakan amanah yang sangat besar untuk dapat dimanfaatkan dengan baik oleh BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan. Dengan jumlah pegawai Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan per 31 Desember 2018 berjumlah 15.346 Pegawai akan melaksanakan kegiatan diklat maka akan ada 175 angkatan diklat per tahun (1 angkatan 40 orang peserta), ditambah lagi Aparatur Sipil Negara yang ada di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, maka potensi pengguna jasa layanan di BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan akan semakin besar.

* + - 1. Pengelolaan kelembagaan belum optimal (peningkatan sarana dan prasarana)

Guna mendukung pelaksanaan kegiatan kediklatan yang terstandar maka diperlukan ketersediaan sarana dan prasarana yang baik dan terstandar, sehingga dengan adanya peningkatan sarana dan prasarana tersebut akan menambah kapasitas pelayanan baik kediklatan maupun non kediklatan (pemanfaatan aset) di BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan, disamping itu peningkatan kualitas penyelenggaraan melalui akreditasi perlu ditingkatkan, karena belum semua jenis diklat terakreditasi.

* + - 1. Kurangnya Penerapan Sistem Teknologi Informasi (IT)

Sistem Teknologi Informasi (IT) belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam penyelenggaraan Diklat karena belum tersedianya sistem/program khusus untuk sistem manajemen informasi kediklatan sehingga data kediklatan masih dalam bentuk manual. Penerapan Sistem informasi kediklatan di BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan harus menjadi salah satu prioritas dalam pengembangan BPSDMD sehingga akan memberikan kemudahan, kecepatan dan meningkatkan ketepatan dalam pengelolaan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah.

* + - 1. Pemenuhan kualitas dan kuantitas SDM Widyaiswara (Pelatihan/TOT WI)

Dalam rangka peningkatan kualitas/kapasitas SDM Aparatur, BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan berbagai jenis diklat yang dikatagorikan kedalam diklat kepemimpinan, Teknis, Fungsional dan Pemerintahan. Untuk diklat kepemimpinan dan pemerintahan dapat dipenuhi oleh Widyaiswara yang ada, sedangkan Diklat Teknis dan Fungsional masih dirasakan kekurangan tenaga pengajar. Berbagai upaya telah dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan tersebut, diantaranya dengan mengadakan diklat calon widyaiswara dan melakukan kerjasama dengan instansi/lembaga serta perguruan tinggi untuk memberikan pelayanan di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

* + - 1. Optimalisasi monitoring terhadap alumni Diklat

Sejauh ini pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pemberdayaan alumni pasca diklat setelah dikembalikan ke Perangkat Daerah masing-masing Kabupaten/Kota belum dilaksanakan secara optimal.

* + - 1. Berbagai rencana pengembangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah yang telah disusun tidak akan dapat terlaksana dengan baik jika tidak di dukung dengan ketersediaan anggaran yang mencukupi. Pada saat ini BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan masih menghadapi kendala dengan kurangnya anggaran untuk pembiayaan berbagai program dan kegiatan, baik untuk pengembangan maupun untuk operasional.

**BAB IV**

**TUJUAN DAN SASARAN**

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

Secara skematik keterkaitan antara visi, misi dengan perumusan tujuan dan sasaran, program dan kegiatan yang secara totalitas menjadi arsitektur kinerja pembangunan daerah, dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 4.1

Arsitektur Kinerja Pembangunan Daerah

Visi/Misi

"Apa saja yang ingin diubah"

Hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome

Dampak (*impact*)

Tujuan/ Sasaran

"Apa saja yang ingin dicapai"

Manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk beneficiaries tertentu sebagai hasil dari output

Hasil (outcome)

Program

"Apa yang dikerjakan dan dihasilkan (barang) atau dilayani (proses)

Produk/barang/jasa adalah yang dihasilkan dari proses/kegiatan yang menggunakan input

Hasil (Output)

Kegiatan

"Apa saja digunakan dalam bekerja"

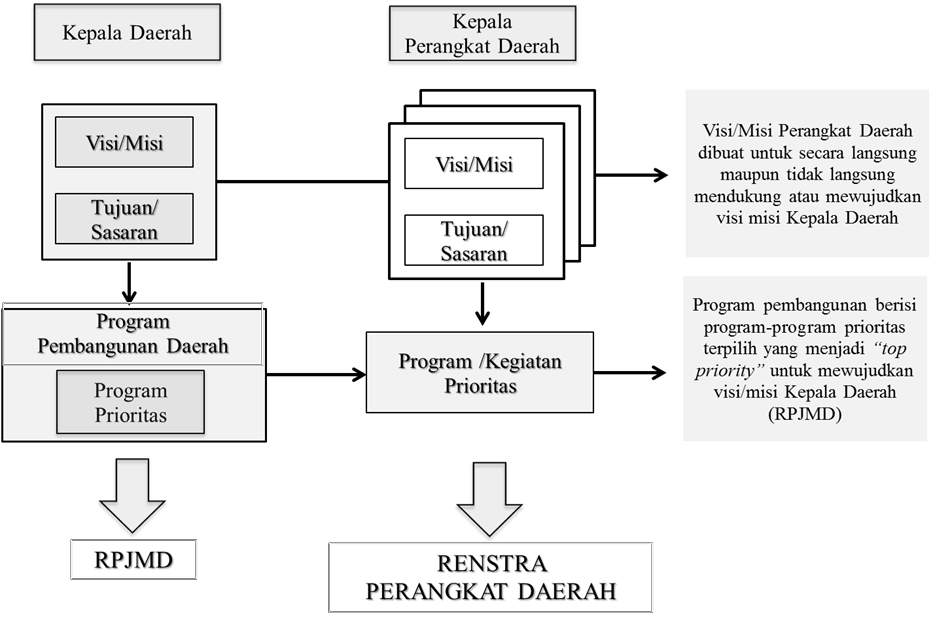
Sumberdaya yang memberikan kontribusi dalam menghasilkan ouput

Input

Rumusan tujuan dan sasaran berdasarkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih menjadi landasan perumusan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan Renstra BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan untuk periode 5 (lima) tahun. Kuatnya hubungan kedua lembaga antara kepala daerah dan Perangkat Daerah dalam perumusan tujuan dan sasaran untuk mewujudkan visi dan misi, dapat dijelaskan dalam bagan berikut ini:

Gambar 4.2

Hubungan Kinerja Pembangunan Daerah



* 1. **Tujuan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan**

Penetapan tujuan BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan mengacu pada Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dari Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan terpilih.

BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan tupoksinya mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang pengembangan sumber daya manusia aparatur, untuk itu BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan harus dapat mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih yaitu Tujuan ke-4 yaitu **Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan** dan sasaran ke-11 yaitu **Maju Aparatur yang Profesional dan Berintegritas** (melalui meningkatnya profesionalisme dan integritas aparatur pemerintah daerah).

Guna mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Gubernur dan Wakil Gubernur tersebut, BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan menetapkan 2 tujuan yaitu Mewujudkan Sumber Daya Aparatur yang kompeten dan Mewujudkan Pengelolaan Kelembagaan Diklat yang sesuai dengan standar.

Untuk mewujudkan Tujuan Sumber Daya Aparatur yang kompeten tersebut, dapat dilaksanakan melalui 2 (dua) Sasaran yaitu Meningkatnya Kompetensi Manajerial Aparatur, dan Meningkatnya Kompetensi Teknis Fungsional, Kompetensi Sosio-Cultural dan Kompetensi Pemerintahan ASN.

Dalam upaya mencapai Sasaran untuk meningkatkan kompetensi manajerial bagi ASN, BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan melaksanakannya melalui pendidikan dan pelatihan manajerial/struktural bagi pejabat ASN baik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan maupun di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota. Sedangkan dalam upaya mencapai sasaran untuk Meningkatkan Kompetensi Teknis Fungsional, Kompetensi Sosio Cultural dan Kompetensi Pemerintahan ASN dilaksanakan melalui upaya pengembangan kompetensi teknis dan fungsional, kompetensi sosio cultural dan kompetensi pemerintahan. Ketiga kompetensi tersebut sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dalam jabatan-jabatan tertentu, sehingga upaya pengembangannya dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran Aparatur yang Profesional dan Berintegritas sesuai dengan Tujuan dan Sasaran Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel Terpilih.

Tujuan BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan kedua yaitu mewujudkan pengelolaan kelembagaan diklat yang sesuai dengan standar. Untuk mewujudkan Tujuan yang kedua ini akan dilaksanakan melalui Sasaran-Sasaran berikut yaitu meningkatkan kualitas tenaga kediklatan, meningkatkan jumlah diklat yang terakreditasi serta meningkatkan sarana dan prasarana kediklatan, dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan diklat.

Agar Tujuan dan Sasaran tersebut dapat dicapai maka tentu diperlukan penentuan target per tahun selama 5 (lima) tahun ke depan. Penentuan target ditetapkan dengan mempertimbangkan persentase dalam skala 0-100%. Angka tersebut antara lain didapat dengan persentase jumlah Jabatan yang ada dan dikurangi dengan alumni Pejabat ASN yang telah mengikuti diklat dalam jabatan tersebut. Tabel berikut menggambarkan Tujuan dan Sasaran beserta targetnya selama 5 (lima) tahun ke depan.

**Tabel T-C 25**

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO.** | **TUJUAN** | **SASARAN** | **INDIKATOR TUJUAN/SASARAN** | **TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-** | | | | |
| **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Mewujudkan Sumber Daya Aparatur yang kompeten | Meningkatnya kompetensi manajerial Aparatur | Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan manajerial / struktural | 80% | 85% | 87% | 88% | 90% |
| Meningkatnya kompetensi teknis fungsional, kompetensi sosio cultural dan kompetensi pemerintahan ASN | Persentase ASN yang telah mengikuti pengembangan kompetensi teknis dan fungsional, kompetensi sosio cultural dan kompetensi pemerintahan | 35% | 45% | 55% | 65% | 75% |
| 2 | Mewujudkan Pengelolaan Kelembagaan Diklat yang sesuai dengan standar | Meningkatkan Sarana dan Prasarana kediklatan | Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kediklatan | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% |
| Meningkatkan kualitas tenaga kediklatan | Persentase tenaga kediklatan diklat yang bersertifikat (pengelola, penyelenggara dan widyaiswara) | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% |
|  |
|  |  | Meningkatkan kualitas penyelenggaraan diklat | Persentase Diklat yang mempunyai Nilai Evaluasi Memuaskan | 85% | 87% | 90% | 93% | 95% |
|  |  |  | Indeks kepuasan masyarakat | Baik | Baik | Baik | Sangat baik | Sangat baik |

**BAB V**

**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

* 1. **Strategi**

Strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran atau rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Cara dimaksud dapat berupa penetapan kebijakan dan program operasional dengan memperhatikan sumber daya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi. Strategi merupakan terjemahan pemikiran kepada tindakan yang diarahkan pada penyelenggaraan operasional sehari-hari dari seluruh jajaran Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Strategi dan arah kebijakan dirumuskan dengan memerhatikan atau sebagai jawaban/solusi atas (analisis) permasalahan dan isu strategis tugas dan fungsi BPSDMD dalam mendukung peningkatan kompetensi SDM Aparatur Provinsi Sumatera Selatan. Di samping itu, strategi dan arah kebijakan juga diselaraskan dengan strategi dan arah kebijakan dalam RPJMD, khususnya yang berhubungan dengan reformasi birokrasi dalam upaya meningkatkan integritas dan perbaikan layanan aparatur.

**Tabel 5.1**

**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan pada Misi III RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023**

|  |  |
| --- | --- |
| **Visi :**  Sumsel Maju untuk Semua | |
| **Misi III :**  Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas yang didukung aparatur pemerintahan yang jujur, berintegritas, profesional, dan responsif. | |
| **Tujuan RPJDM :**  Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan | |
| **Sasaran RPJMD**  Meningkatnya Profesionalisme Integritas Aparatur Pemerintah Daerah (*Maju Aparatur Profesional dan Berintegritas*) | |
| **Strategi RPJMD :**  Meningkatkan integritas ASN. | **Arah Kebijakan RPJMD :**   * + 1. Peningkatan Kualitas Aparatur Pemerintah di Semua Bidang.     2. Mengoptimalkan Pengawasan Melekat.     3. Mendorong Masyarakat Untuk Melakukan Kontrol Terhadap Kinerja     4. Pemerintahan Menuju Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*).     5. Meningkatkan Tunjangan ASN Berbasis Kinerja. |

Dengan mengacu pada strategi dan arah kebijakan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 di atas dan dalam mencapai tujuan dan sasaran BPSDMD Provinsi Provinsi Sumatera Selatan, dirumuskan strategi Renstra BPSDMD Tahun 2019-2023, sebagai berikut :

1. Merencanakan program peningkatan kompetensi baik kompetensi manajerial, kompetensi teknis dan fungsional, kompetensi sosiokultural maupun kompetensi pemerintahan.
2. Melaksanakan pengembangan kompetensi ASN
3. Melaksanakan evaluasi pasca diklat
4. Merencanakan dan melaksanakan program peningkatan kualitas tenaga kediklatan
5. Memelihara dan Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kediklatan

**Arah Kebijakan**

Dalam rangka pelaksanaan strategi untuk dapat mencapai sasaran dengan lebih baik, maka perlu dirumuskan strategi yang tepat dan komprehensif, sebagai landasan dalam melaksanakan kebijakan program dan kegiatan. Beberapa kebijakan yang diterapkan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut :

* + - 1. Meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pemangku kepentingan peningkatan kompetensi ASN
      2. Melaksanakan dan berpartisipasi dalam pengembangan kompetensi ASN
      3. Melaksanakan dan mengoptimalkan monitoring dan evaluasi diklat baik untuk penyelenggara maupun tenaga pengajar
      4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana diklat
      5. Penguatan SOP pengelolaan Sarana dan Prasarana diklat
      6. Melaksanakan dan berpartisipasi dalam kegiatan peningkatan kualitas tenaga kediklatan seperti *Training Officer Course*, *Management Of Training, Training Of Facilitator, Traning Of Trainer, Workshop dan Focus Group Discussion.*
      7. Meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan stakeholder terkait pelaksanaan akreditasi diklat
      8. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan diklat
      9. Mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan diklat
      10. Mengoptimalkan penggunaan metode, teknis dan strategi pembelajaran yang baik

Adapun tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut :

**Tabel 5.2**

**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan BPSDMD Prov. Sumsel**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| VISI : Sumsel Maju Untuk Semua | | | |
| MISI III : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas KKN dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas yang didukung aparatur pemerintahan yang jujur, berintegritas, profesional dan responsif | | | |
| **Tujuan** | **Sasaran** | **Strategi** | **Arah Kebijakan** |
| Mewujudkan Sumber Daya Aparatur yang kompeten | 1. Meningkatkan kompetensi manajerial Aparatur | 1. Merencanakan program peningkatan kompetensi manajerial sesuai jenjang jabatan 2. Melaksanakan pengembangan kompetensi ASN 3. Evaluasi pasca diklat | 1. Meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pemangku kepentingan peningkatan kompetensi manajerial 2. Melaksanakan dan berpartisipasi dalam pengembangan kompetensi ASN 3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi |
|  | 1. Meningkatkan kompetensi teknis fungsional, kompetensi sosio cultural dan kompetensi pemerintahan ASN | * + - 1. Merencanakan dan melaksanakan program peningkatan kompetensi teknis dan fungsional, kompetensi sosio kultural dan kompetensi pemerintahan ASN       2. Melaksanakan pengembangan kompetensi ASN       3. Evaluasi pasca diklat | * + - 1. Meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pemangku kepentingan peningkatan kompetensi teknis dan fungsional, sosiokultural dan kompetensi pemerintahan       2. Melaksanakan dan berpartisipasi dalam pengembangan kompetensi ASN       3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi |
| **Tujuan** | **Sasaran** | **Strategi** | **Arah Kebijakan** |
| Mewujudkan Pengelolaan Kelembagaan Diklat yang sesuai dengan standar | 1. Meningkatkan Sarana dan Prasarana kediklatan | Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan kediklatan | Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana diklat  Penguatan SOP pengelolaan Sarana dan Prasarana diklat |
| 1. Meningkatkan kualitas tenaga kediklatan | Merencanakan dan melaksanakan program peningkatan kualitas tenaga kediklatan | Melaksanakan dan berpartisipasi dalam kegiatan peningkatan kualitas tenaga kediklatan seperti Training Officer Course, Management Of Training, Training Of Facilitator, Traning Of Trainer, Workshop dan Focus Group Discussion |
|  | 1. Meningkatkan jumlah diklat yang terakreditasi | Terlaksananya peningkatan kualitas dan kuantitas akreditasi jenis diklat | Meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan stakeholder terkait  Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan diklat |
|  | 1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan diklat | Terlaksananya kegiatan kediklatan yang berkualitas | * + 1. Mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan diklat     2. Mengoptimalkan penggunaan metode, teknis dan strategi pembelajaran yang baik     3. Mengoptimalkan monitoring dan evaluasi diklat |

**BAB VI**

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Rencana program yang ditetapkan merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumsel sebagaimana yang dituangkan dalam Rencana Stratejik. Selanjutnya diidentifikasi dan ditetapkan kegiatan-kegiatan prioritas pada tahun yang bersangkutan yang merupakan satu kesatuan dari perencanaan strategis. Adapun kegiatan-kegiatan prioritas tahun 2019-2023 sebagai berikut :

* 1. **PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2019-2020**

Program dan Kegiatan OPD Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan 8 (Delapan) Program dengan 93 (Sembilan Puluh Tiga) Kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Internet
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
6. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
7. Penyediaan Alat Tulis Kantor
8. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
11. Penyediaan Makanan dan Minuman
12. Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran
13. Penyediaan Jasa Tutor SKJ
14. Pengadaan Jasa Keamanan Kantor
15. Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah, ke Luar Daerah dan Luar Negeri

**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

1. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan rumah tangga
3. Pembangunan Gedung Kantor
4. Pengadaan Kendaraan Dinas
5. Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung Kantor
6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
8. Rehab Sedang/Berat Gedung Kantor

**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**

1. Pengadaan pakaian dinas

**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

1. Benchmarking Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah (Dana Insentif Daerah Kinerja Perencanaan Terbaik
2. Capacity Building SDM Aparatur Bidang Perencanaan (Dana Insentif Daerah Kinerja Perencanaan Terbaik )
3. Benchmarking Peningkatan SAKIP Perangkat Daerah (Dana Insentif Daerah Kinerja SAKIP Dengan Nilai A)
4. Bimbingan Teknis SAKIP Perangkat Daerah (Dana Insentif Daerah Kinerja SAKIP Dengan Nilai A)
5. Bimbingan Teknis SAKIP Perangkat Daerah ( Dana Insentif Daerah Kinerja SAKIP Dengan Nilai A)

**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**

1. Penjamin Mutu Diklat
2. Rapat Teknis OPD
3. Penyusunan Rencana Strategis OPD
4. Penyusunan LKJIP Perangkat Daerah

**Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur /PNS/Anggota KORPRI (Hanya Tahun 2019)**

1. Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
2. Uji Kompetensi dan Sertifikasi
3. Pengembangan Sistem Informasi Kediklatan
4. Sosialisasi Pelaksanaan Orientasi DPRD Kab/Kota se-Sumsel
5. Workshop Pengembangan Kompetensi Teknis Inti
6. Diklat Peningkatan Kapasitas Desa
7. Diklat Training Officer Course (TOC)
8. Diklat Penyusunan Karya Tulis Ilmiah bagi Widyaiswara
9. Diklat Training Multi Media Presentation
10. Diklat Bendahara Sekolah
11. Diklat Peningkatan Kompetensi Bidan
12. Diklat Bendahara Keuangan Daerah
13. Diklat Protokol

**Program Pengembangan Kompetensi Aparatur**

1. Pengembangan Sistem Informasi Kediklatan
2. Analisis Kebutuhan Diklat
3. Penyelenggaraan Akreditasi Diklat
4. Diklat Kepemimpinan Tngkat II / Pelatihan Kepemipinan Nasional II
5. Diklat Kepemimpinan Tngkat III / Pelatihan Kepemimpinan Administrator
6. Diklat Kepemimpinan Tngkat IV / Pelatihan Kepemimpinan Pengawas
7. Diklat Dasar CPNS
8. Sosialisasi Pelaksanaan Orientasi DPRD Kab/Kota se Sumsel
9. Workshop Pengembangan Kompetensi Teknis Inti
10. Diklat Peningkatan Kapasitas Desa
11. Diklat Teknis Administrasi Dasar bagi PNS
12. Diklat Pelayanan Publik
13. Diklat Manajemen Kearsipan
14. Pembinaan dan Pengembangan Kompetensi Non Pelayanan
15. Diklat Dasar Pol PP Pola 150 JP
16. Diklat Penataan Batas Wilayah dan Penanganan Komplik Pertahanan
17. Diklat Peningkatan Pelayanan Publik
18. Teknis Tata Naskah Dinas
19. Diklat Penyusunan APBD
20. Diklat Teknis Pengelolaan Perpustakaan Sekolah
21. Pembinaan dan Pengembangan Kompetensi Pelayanan Dasar dan Pilihan
22. Diklat Pengembangan Kepribadian Aparatur
23. Diklat Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
24. Diklat Pengelolaan Perpajakan
25. Pembinaan dan Pengembangan Kompetensi Perangkat Daerah Penunjang
26. Penyelenggaraan Akreditasi Diklat
27. Diklat Penyusunan Karya Tulis Ilmiah bagi Widyaiswara
28. Diklat Training Multi Media Presentation
29. Diklat Persiapan Pensiun
30. Diklat Tata Cara dan Teknis Penilaian Aset
31. Diklat Management of Training (MOT)
32. Diklat Revolusi Mental
33. Diklat Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Pegawai Negeri Sipil
34. Diklat Manajemen Penilaian Kerja Individu/PNS
35. Diklat Peningkatan Kualitas PelayananPublik
36. Uji Kompetensi dan Sertifikasi
37. Uji Kompetensi dan diklat P2UPD
38. Diklat penguatan jafung polisi pamong praja
39. Diklat Perhitungan Angka Kredit Pol PP
40. Pembekalan dan Uji Kompetensi Pol PP
41. Diklat pemadam kebakaran
42. Pembekalan dan Uji Kompetensi Camat
43. Diklat Bendahara Sekolah
44. Diklat Bendahara Keuangan Daerah
45. Diklat Peningkatan Kompetensi Bidan
46. Diklat Protokol
47. Diklat Pelayanan Publik bagi ASN
48. Diklat Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah (OL)
49. Diklat Pariwisata (OL)
50. Diklat Manajemen Kepegawaian
51. Diklat Manajemen Kepala Sekolah
52. Diklat Manajeman Kebakaran
53. Diklat Fungsional Profesionalitas Guru
54. Diklat Fungsional Tenaga Pranata Komputer
55. Diklat Fungsional Pranata Laboratorium
56. Diklat Fungsional Pertanian
57. Diklat Fungsional Tenaga Perawat Kesehatan

**Pendidikan Kedinasan**

1. Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme Aparatur
2. Orasi Ilmiah

**Program Peningkatan Kualitas Pengembangan Sumber Daya Manusia Badan Layanan Umum Daerah/BLUD**

* + - * Pelayanan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
  1. **PROGRAM KEGIATAN TAHUN 2021-2022**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021, Nomenklatur program dan kegiatan harus mengikuti peraturan tersebut, untuk itu program, kegiatan dan sub kegiatan pada BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan untuk tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

* + - 1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**
         1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
8. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   * + - 1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
9. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
10. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
11. Pelaksanaan Penatausaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
    * + - 1. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
        1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
        2. Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian
        3. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
        4. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
        5. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
        6. Administrasi Umum Perangkat Daerah
12. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
13. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
14. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
15. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
16. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
17. Fasilitasi Kunjungan Tamu
18. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
19. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
20. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
    * + 1. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
21. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
22. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
23. Pengadaan Mebel
24. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
25. Pengadaan Aset Tetap Lainnya
26. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
27. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
    * + 1. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
28. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
29. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
30. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
31. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
32. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
33. Urusan Pemerintahan Daerah
34. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
35. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
36. Pemeliharaan Mebel
37. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
38. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
39. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
40. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
41. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
    * + 1. Peningkatan Pelayanan BLUD
42. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
    * + 1. **Program Pengembangan Sumber Daya Manusia**
43. Pengembangan Kompetensi Teknis
44. Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
45. Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
46. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
47. Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
48. Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
49. Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional
50. Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi
51. Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
52. Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar
53. Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga
54. Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional
55. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan
56. Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan

Adapun rincian pendanaan kegiatan-kegiatan prioritas tahun 2019-202 dan tahun 2021-2023 pada Perangkat Daerah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat pada tabel 6.1 dan tabel 6.2 dibawah ini.

**Tabel 6.1**

**Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2020**

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator,  Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2018) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab | Lokasi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tahun 2019 | | | | Tahun 2020 | | | |
| Kinerja | | Anggaran (Rp) | | Kinerja | | Anggaran (Rp) | |
|  |  |  |  |  |  | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
| Mewujudkan Pengelolaan Kelembagaan Diklat yang sesuai dengan standar | Meningkatkan kualitas penyelenggaraan diklat |  | **Penyediaan Administrasi Perkantoran** | **Persentase Administrasi Perkantoran yang terlayani** | **100%** | **100%** | **100%** | **2.519.287.000** | **2.364.744.370,00** | **100%** | **100%** | **2.635.605000** | 2.294.614.516 |  |  |
|  |  |  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah materai, perangko yang dibutuhkan dalam 1 tahun | 100% | 2150 Materai dan perangko | 2150 Materai dan perangko | 10.000.000 | 9.999.000,00 | 2150 Materai dan perangko | 2150 Materai dan perangko | 10.000.000 | 9.000.000 |  |  |
|  |  |  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Internet | Jumlah rekening telepon, air dan listrik,internet | 100% | 48 Rekening | 48 Rekening | 1.000.930.000 | 882.149.871,00 | 48 Rekening | 48 Rekening | 989.715.000 | 745.078.262 |  |  |
|  |  |  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara | 100% | 16 Kendaraan | 16 Kendaraan | 20.000.000 | 11.065.450,00 | 16 Kendaraan | 16 Kendaraan | 20.000.000 | 4.200.000 |  |  |
|  |  |  | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Jumlah pengelola keuangan yang dibayar | 100% | 12 Bulan | 12 Bulan | 34.200.000 | 32.900.000,00 | 12 Bulan | 12 Bulan | 31.800.000 | 31.800.000 |  |  |
|  |  |  | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Jumlah pembayaran jasa kebersihan kantor | 100% | 12 Bulan | 12 Bulan | 580.400.000 | 580.370.600,00 | 12 Bulan | 12 Bulan | 580.400.000 | 575.973.000 |  |  |
|  |  |  | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | Jumlah peralatan kerja yang terpelihara | 100% | 12 Bulan | 12 Bulan | 75.000.000 | 69.400.000,00 | 12 Bulan | 12 Bulan | 50.000.000 | 50.000.000 |  |  |
|  |  |  | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jumlah alat tulis kantor yang tersedia | 100% | 30 jenis | 30 jenis | 65.000.000 | 65.000.000,00 | 30 jenis | 30 jenis | 49.000.000 | 49.000.000 |  |  |
|  |  |  | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia | 100% | 10 Jenis/Item | 10 Jenis/Item | 64.000.000 | 63.900.000,00 | 10 Jenis/Item | 10 Jenis/Item | 45.000.000 | 44.800.000 |  |  |
|  |  |  | Penyediaan komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tersedia | 100% | 25 Jenis | 25 Jenis | 50.000.000 | 49.993.450,00 | 25 Jenis | 25 Jenis | 50.000.000 | 49.993.450 |  |  |
|  |  |  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah bahan bacaan an dan peraturan per UU yang tersedia | 100% | 7 Jenis | 7 Jenis | 10.000.000 | 9.964.000,00 | 7 Jenis | 7 Jenis | 10.000.000 | 9.968.000 |  |  |
|  |  |  | Penyediaan Makanan dan Minuman | Jumlah makanan dan minuman rapat yang tersedia | 100% | 12 Bulan | 12 Bulan | 45.744.000 | 45.700.000,00 | 12 Bulan | 12 Bulan | 30.000.000 | 29.900.000 |  |  |
|  |  |  | Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran | Jumlah gaji pegawai non pns | 100% | 39 OB | 39 OB | 112.020.000 | 99.150.000,00 | 39 OB | 39 OB | 246.090.000 | 190.260.000 |  |  |
|  |  |  | Penyediaan Jasa Tutor SKJ | Jumlah honor instruktur SKJ | 100% | 47 Kali | 47 Kali | 14.100.000 | 14.100.000,00 | 47 Kali | 47 Kali | 3.600.000 | 3.600.000 |  |  |
|  |  |  | Penyediaan Jasa Keamanan Kantor | Jumlah pembayaran jasa keamanan kantor | - | - | - | 54.000.000 | 53.625.000,00 | 60 OB | 60 OB | 215.000 | 214.500.000 |  |  |
|  |  |  | Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah, ke Luar Daerah dan Luar Negeri | Jumlah dokumen laporan perjalanan dinas yang tersusun | 100% | 110 Kali | 110 Kali | 383.893.000 | 377.426.999,00 | 120 Kali | 120 Kali | 305.000.000 | 285.641.804 |  |  |
| Mewujudkan Pengelolaan Kelembagaan Diklat yang sesuai dengan standar | Meningkatkan Sarana dan Prasarana kediklatan |  | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana** | **Persentase sarana dan prasarana aparatur yang berfungsi baik** | **100%** | **100%** | **100%** | **585.000.000** | **564.315.000** | **100%** | **100%** | **3.199.200.000** | **2.600.363.430** |  |  |
|  |  |  | Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor | **-** | 1 Jenis | 1 Jenis | 30.000.000 | 29.982.000 | 5 jenis | 5 jenis |  |  |  |  |
|  |  |  | Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan rumah tangga | Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan rumah tangga/ asrama | - | - | - | - | - | 10 jenis | 10 jenis | 100.000.000 | 99.401.500 |  |  |
|  |  |  | Pembangunan Gedung Kantor | Jumlah gedung kantor yang dibangun | - | - | - | - | - | 1 gedung | 1 gedung | 1.242.600.000 | 1.202.512.000 |  |  |
|  |  |  | Pengadaan Kendaraan Dinas | Jumlah kendaraan dinas yang dibeli | - | - | - | - | - | 1 unit | 1 unit | 1.056.600.000 | 532.000.000 |  |  |
|  |  |  | Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung Kantor | Jumlah gedung kantor yang terpelihara | 100% | 10 Gedung | 10 Gedung | 40.000.000 | 39.982.000 | 10 Gedung | 10 Gedung | 370.000.000 | 369.149.000 |  |  |
|  |  |  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara | 100% | 16 Kendaraan | 16 Kendaraan | 165.000.000 | 146.900.000 | 16 Kendaraan | 16 Kendaraan | 225.000.000 | 202.976.930 |  |  |
|  |  |  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara | 100% | 12 Bulan | 12 Bulan | 140.000.000 | 139.814.000 | 12 Bulan | 12 Bulan | 105.000.000 | 94.920.000 |  |  |
|  |  |  | Rehab Sedang/Berat Gedung Kantor | Jumlah gedung kantor yang direhab | **-** | 1 Gedung / Unit/Paket | 1 Gedung / Unit/Paket | 210.000.000 | 207.719.000 |  |  |  |  |  |  |
| Mewujudkan Pengelolaan Kelembagaan Diklat yang sesuai dengan standar | Meningkatkan kualitas penyelenggaraan diklat |  | **Program Peningkatan Disiplin Aparatur** | **Persentase peningkatan disiplin aparatur** | **0%** |  |  |  |  | **100%** | **100%** | **184.000** |  |  |  |
|  |  |  | Pengadaan pakaian dinas | Jumlah jenis pakaian dinas yang tersedia | - | - | - |  |  | 4 jenis (PDH, PSH, batik, olahraga) | 4 jenis (PDH, PSH, batik, olahraga) | 184.000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pengelolaan Kelembagaan Diklat yang sesuai dengan standar | Meningkatkan kualitas tenaga kediklatan |  | **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** | **Persentase peningkatan kapasitas aparatur** | **0%** | **100%** | **100%** | 120.900.000 | 113.374.481 | **100%** | **100%** | **37.224.000** | **36.494.063** |  |  |
|  |  |  | *Benchmarking* Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah (Dana Insentif Daerah Kinerja Perencanaan Terbaik ) | Jumlah Aparatur yang mengikuti Benchmarking perencanaan pembangunan | **0%** | 3 Orang | 3 Orang | 30.750.000 | 30.186.237 | **-** | **-** | **-** |  |  |  |
|  |  |  | *Capacity Building* SDM Aparatur Bidang Perencanaan (Dana Insentif Daerah Kinerja Perencanaan Terbaik ) | Jumlah Aparatur yang mengikuti Capacity Building bidang perencanaan | **0%** | 3 Orang | 3 Orang | 40.700.000 | 38.639.900 | **-** | **-** | **-** |  |  |  |
|  |  |  | *Pembinaan SAKIP Perangkat Daerah (DID Kinerja SAKIP)* | Jumlah Aparatur yang mengikuti *SAKIP Perangkat Daerah* | **0%** |  |  |  |  | 3 Orang | 3 Orang | **15.625.000** | 15.624.515 |  |  |
|  |  |  | *Benchmarking* Peningkatan SAKIP Perangkat Daerah (Dana Insentif Daerah Kinerja SAKIP dengan Nilai A) | Jumlah Aparatur yang mengikuti pembinaan SAKIP perangkat daerah | **0%** | 3 Orang | 3 Orang | 25.750.000 | 22.623.980 |  |  | 21.599.000 | 20.896.548 |  |  |
|  |  |  | Bimbingan Teknis SAKIP Perangkat Daerah (Dana Insentif Daerah Kinerja SAKIP Dengan Nilai A) | Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimbingan Teknis SAKIP | **0%** | 3 Orang | 3 Orang | 23.700.000 | 21.924.364 | **-** | **-** | - |  |  |  |
| Mewujudkan Pengelolaan Kelembagaan Diklat yang sesuai dengan standar | Meningkatkan kualitas penyelenggaraan diklat |  | **Program Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan** | **Persentase sistem capaian kinerja yang meningkat / berkembang** |  |  |  | 200.000.000 | 184.872.567 | - | - | **165.160.000** | 115.429.989 |  |  |
|  |  |  | Penjaminan Mutu Diklat | Jumlah dokumen program /kegiatan | **100%** | **100%** | **100%** | 110.000.000 | 101.780.000 | **100%** | **100%** | 85.550.000 | 54.350.000 |  |  |
|  |  |  | Rapat Teknis OPD | Jumlah dokumen program /kegiatan | **100%** | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 40.000.000 | 39.193.079 | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 29.610.000 | 29.610.000 |  |  |
|  |  |  | Penyusunan Rencana Strategis OPD | Jumlah Dokumen renstra OPD | **100%** | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 50.000.000 | 43.899.488 | 1 Dokumen | 1 Dokumen | - |  |  |  |
|  |  |  | Penyusunan LKJIP Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen LKJIP | **100%** | 1 Dokumen | 1 Dokumen | - | - | - | - | 50.000.000 | 31.469.989 |  |  |
| Mewujudkan Sumber Daya Aparatur yang kompeten | Meningkatkan kompetensi teknis fungsional, kompetensi sosio cultural dan kompetensi pemerintahan ASN |  | **Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur/PNS/ Anggota KORPRI** | **Persentase peningkatan kapasitas aparatur** | **-** | **-** | **-** | 2.468.518.000 | 2.272.299.017 | 1 Dok | 1 Dok | - | - |  |  |
|  |  |  | Diklat Kepemimpinan Tingkat IV | Jumlah ASN yang mengikuti diklat kepemimpinan tingkat IV | **100%** | **100%** | **100%** | 600.000.000 | 581.274.983 | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Uji Kompetensi dan Sertifikasi | Jumlah ASN yang mengikuti uji komptensi dan sert | 100% | 40 orang | 40 orang | 166.725.000 | 155.256.125 | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Pengembangan system informasi kediklatan | Jumlah system informasi kediklatan | 100% | 1 sistem | 1 sistem | 150.000.000 | 147.875.672 | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Sosialisasi Pelaksanaan Orientasi DPRD Kab/Kota se Sumsel | Jumlah Anggota DPRD yang mengikuti Orientasi DPRD | 100% | 50 orang | 50 orang | 91.550.000 | 85.539.359 | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Workshop Pengembangan Kompetensi Teknis Inti | Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek pengembangan kepribadian aparatur | 100% | 60 orang | 60 orang | 97.800.000 | 90.578.609 | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Diklat peningkatan kapasitas desa | Jumlah aparatur yang mengikuti diklat peningkatan kapasitas desa | 100% | 30 orang | 30 orang | 325.150.000 | 323.542.918 | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Diklat Training Officer Course (TOC) | jumlah ASN yang mengikuti Diklat TOC | 100% | 30 orang | 30 orang | 195.775.000 | 138.192.268 | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Diklat Penyusunan Karya Tulis Ilmiah bagi Widyaiswara | jumlah ASN yang mengikuti diklat Penyusunan Karya Tulis Ilmiah bagi Widyaiswara | 100% | 40 orang | 40 orang | 96.000.000 | 87.542.189 | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Diklat Training Multi Media Presentation | Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Training Multi Media Presentation | 100% | 30 orang | 30 orang | 63.268.000 | 63.268.000 | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Diklat Bendahara sekolah | Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Bendahara | 100% | 40 orang | 40 orang | 147.250.000 | 144.259.800 | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Diklat peningkatan kompetensi bidan | Jumlah aparatur yang mengikuti diklat bidan | 100% | 40 orang | 40 orang | 170.000.000 | 137.644.560 | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Diklat bendahara keuangan daerah | Jumlah aparatur yang mengikuti diklat bendahara keuangan daerah | 100% | 40 orang | 40 orang | 200.000.000 | 170.610.040 | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Diklat Protokol | Jumlah aparatur yang mengikuti diklat protokol | 100% | 40 orang | 40 orang | 165.000.000 | 146.714.494 |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mewujud kan Penge lolaan Ke lembagaan Diklat yang sesuai dengan standar | Meningkatkan kualitas penyelenggaraan diklat |  | **Program Pengembangan Kompetensi Aparatur** | **Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan** | - | - | - | - | - | **100%** | **100%** | **503.173.500** | **481.073.487** |  |  |
|  |  |  | Pengembangan Sistem Informasi Kediklatan | Tersedianya data base sistem Informasi Kediklatan | - | - | - | - | - | 1 aplikasi/ sistem | 1 aplikasi/ sistem | 72.695.000 | 72.574.000 |  |  |
|  |  |  | **BIDANG MANAJERIAL** |  |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |
| Mewujudkan Sumber Daya Aparatur yang kompeten | Meningkat kan kompe tensi teknis fungsional, kompetensi sosio cultural dan kompetensi pemerintahan ASN |  | **BIDANG TEKNIS INTI** |  | - | - |  | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Diklat Pengembangan Kepribadian Aparatur | Jumlah ASN yang mengikuti Pengembangan Kepribadian Aparatur | - | - | - | - | - | 40 orang | 40 orang | 14.711.000 | 14.710.900 |  |  |
|  |  |  | Diklat Peningkatan Pendapatan Asli Daerah | Jumlah ASN yang mengikuti Peningkatan Pendapatan Asli Daerah | - | - | - | - | - | 40 orang | 40 orang | 120.000.000 | 99.283.803 |  |  |
|  |  |  | **BIDANG SERTIFIKASI** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Penyelenggaraan Akreditasi Diklat | Jumlah dokumen akreditasi | - | - | - | - | - | 1 dokumen | 1 dokumen | 144.882.500 | 144.789.932 |  |  |
|  |  |  | **BIDANG TEKNIS UMUM DAN FUNGSIONAL** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Diklat Bendahara Sekolah | Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Bendahara Sekolah | - | - | - | - | - | 40 orang | 40 orang | 140.000.000 | 138.830.262 |  |  |
|  |  |  | Diklat Pelayanan Publik bagi ASN | Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Pelayanan Publik bagi ASN | - | - | - | - | - | 30 orang | 30 orang | 10.885.000 | 10.884.590 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pengelola an Kelem bagaan Diklat yang sesuai dengan standar | Meningkatkan kualitas tenaga kediklatan |  | **Program Pendidikan Kedinasan** | **Persentase peningkatan ketgerampilan dan profesional aparatur** | **100%** | **100%** | **100%** | 250.000.000 | 213.046.366 | **100%** | **100%** |  |  |  |  |
|  |  |  | Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme | Meningkatnya kualitas dan kompetensi aparatur | 3 orang | 4 orang | 4  orang | 50.000.000 | 20.137.700 | 2 orang | 2 orang |  |  |  |  |
|  |  |  | Orasi Ilmiah | Terlaksananya orasi ilmiah widyaiswara | 100% | 4 orang | 4 orang | 200.000.000 | 192.908.666 | 1 orang | 1 orang | 9.800.000 | 9.771.700 |  |  |
| Mewujudkan Sumber Daya Aparatur yang kompeten | Meningkat kan kompe tensi teknis fungsional, kompetensi sosio cultural dan kompetensi pemerintahan ASN |  | **Program Peningkatan Kualitas Pengembangan Sumber Daya Manusia Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)** | **Persentase peningkatan kompetensi aparatur melalui PPK BLUD** | **100%** | **100%** | **100%** | **16.113.651.969** | **13969.763.333** | **100%** | **100%** | **10.714.578.499** | **9.717.483.878** |  |  |
|  |  |  | Pelayanan Pengembangan SDM Daerah | Terlaksananya peningkatan kompetensi melalui mekanisme BLUD | 100% | 100% | 100% | 16.113.651.969 | 13.969.763.333 | 100% | 100% | 10.714.578.499 | 9.717.483.878 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Total Anggaran** | | | | | |  |  | **22.257.356.969** | **19.682.415.134** |  |  | **17.264.740.999** | **15.255.231.063** |  |  |

**Tabel 6.2**

**Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021-2023**

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator,  Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2018) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab | Lokasi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | | 2022 | | 2023 | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra | |
| Target Kinerja | Target Anggaran | Target Kinerja | Target Anggaran | Target Kinerja | Target Anggaran | Target Kinerja | Target Anggaran |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
| Mewujudkan Pengelolaan Kelembagaan Diklat yang sesuai dengan standar | Meningkatkan kualitas penyelenggaraan diklat |  | **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi** | **Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Pernagkat Daerah** |  | **100%** |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  |  |  |
|  |  |  | **Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |  |  | 0 | 1 dokumen | 50.000.000 | 1 dokumen | 60.000.000 |  | 110.000.000 |  |  |
|  |  |  | *Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Penyusunan Dokumen RKA SKPD |  |  |  |  |  | 1 dokumen | 50.000.000 |  | 50.000.000 |  |  |
|  |  |  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD |  |  |  |  |  | 1 dokumen | 50.000.000 |  | 50.000.000 |  |  |
|  |  |  | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD |  |  |  |  |  | 1 dokumen | 50.000.000 |  | 50.000.000 |  |  |
|  |  |  | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD |  |  |  |  |  | 1 dokumen | 50.000.000 |  | 50.000.000 |  |  |
|  |  |  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |  | 1 dokumen | 50.000.000 | 1 dokumen | 50.000.000 | 1 dokumen | 50.000.000 |  | 150.000.000 |  |  |
|  |  |  | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pengembangan SDM Aparatur) |  |  |  |  |  | 1 laporan | 120.000.000 |  | 120.000.000 |  |  |
|  |  |  | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **persentase pelaksanaan administrasi keuangan** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN |  | 90 orang | *12.116.376.000* | 80 orang | 13.248.341.000 | 90 orang | 14.500.000.000 |  | 39.864.717.000 |  |  |
|  |  |  | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN |  | 32 orang | *881.010.000* | 49 orang | 959.010.000 | 49 orang | 959.010.000 |  | 2.799.030.000 |  |  |
|  |  |  | Pelaksanaan Penatausaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD |  | 12 dokumen | 52.140.000 | 12 dokumen | 375.600.000 | 12 dokumen | 375.600.000 | 36 dokumen | 803.340.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pengelola an Kelem bagaan Diklat yang sesuai dengan standar | Meningkatkan kualitas tenaga kediklatan |  | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **persentase pelaksanaan administrasi kepegawaian PD** |  |  |  | 100 % | 100.000.000 | 100 % | 100.000.000 |  | 200.000.000 |  |  |
|  |  |  | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan |  | 3 orang | 50.000.000 | 3 orang | 100.000.000 | 3 orang | 100.000.000 |  | 250.000.000 |  |  |
|  |  |  | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mewujudkan Pengelolaan Kelembagaan Diklat yang sesuai dengan standar | Meningkatkan kualitas penyelenggaraan diklat |  | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **persentase pelaksanaan administrasi umum PD** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan |  | 1 paket | 50.000.000 | 1 paket | 115.000.000 | 1 paket | 115.000.000 |  | 280.000.000 |  |  |
|  |  |  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan |  | 1 paket | 65.000.000 | 1 paket | 75.000.000 | 1 paket | 75.000.000 |  | 225.000.000 |  |  |
|  |  |  | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan |  | 1 paket | 65.000.000 | 1 paket | 64.000.000 | 1 paket | 64.000.000 |  | 194.000.000 |  |  |
|  |  |  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan |  | 1 paket | 10.000.000 | 1 paket | 10.000.000 | 1 paket | 10.000.000 |  | 30.000.000 |  |  |
|  |  |  | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu |  | 12 laporan | 40.000.000 | 12 laporan | 50.000.000 | 12 laporan | 50.000.000 |  | 140.000.000 |  |  |
|  |  |  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |  | 120 kali | 285.000.000 | 120 kali | 390.000.000 | 120 kali | 390.000.000 |  | 1.065.000.000 |  |  |
|  |  |  | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD |  | 1 dokumen | 120.000.000 | 1 dokumen | 120.000.000 | 1 dokumen | 120.000.000 |  | 360.000.000 |  |  |
|  |  |  | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **persentase pengadaan BMD penunjang urusan pemerintah daerah** |  |  |  | 100% | 900.000.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan |  |  |  |  |  | 5 unit mobil dan 4 motor | 1.800.000.000 |  | 1.800.000.000 |  |  |
|  |  |  | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan |  | 1 gedung | 1.467.000.000 | 1 gedung | 900.000.000 | 1 gedung | 2.000.000.000 |  | 4.367.000.000 |  |  |
|  |  |  | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **persentase penyediaan jasa pelayanan umum kantor** |  |  |  | 100% | 1.734.600.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat |  | 1 laporan | 10.000.000 | 1 laporan | 15.000.000 | 1 laporan | 15.000.000 |  | 40.000.000 |  |  |
|  |  |  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan |  | 48 laporan | 889.715.000 | 48 laporan | 1.119.600.000 | 48 laporan | 1.119.600.000 |  | 3.128.915.000 |  |  |
|  |  |  | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan |  | 1 laporan | 600.000.000 | 1 laporan | 600.000.000 | 1 laporan | 600.000.000 |  | 1.800.000.000 |  |  |
|  |  |  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | persentase pemeliharaan BMD |  |  |  | 100% | 600.000.000 | 100% | 600.000.000 |  | 1.200.000.000 |  |  |
|  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya |  | 16 kendaraan | 185.000.000 | 16 kendaraan | 185.000.000 | 16 kendaraan | 185.000.000 |  | 555.000.000 |  |  |
|  |  |  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara |  | 12 bulan | 75.000.000 | 12 bulan | 75.000.000 | 12 bulan | 75.000.000 |  | 225.000.000 |  |  |
|  |  |  | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi |  | 10 gedung | 200.000.000 | 10 gedung | 200.000.000 | 10 gedung | 200.000.000 |  | 600.000.000 |  |  |
|  |  |  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi |  | 12 bulan | 140.000.000 | 12 bulan | 140.000.000 | 12 bulan | 140.000.000 |  | 320.000.000 |  |  |
|  |  |  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA** | **Persentase terlaksananya program Pengembangan Sumber Daya Manusia** |  |  |  | 100% | 4.120.000.000 |  |  |  |  |  |  |
| Mewujudkan Sumber Daya Aparatur yang kompeten | Meningkat kan kompe tensi teknis fungsional, kompetensi sosio cultural dan kompetensi pemerintahan ASN |  | **Pengembangan Kompetensi Teknis** | **Persentase Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Teknis** |  |  |  | 100% | 870.000.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum | Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun |  | 1 dokumen | 110.000.000 |  |  | 1 dokumen | 150.000.000 |  | 260.000.000 |  |  |
|  |  |  | Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum | Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum | jumlah peserta yang mengikuti pengembangan Kompetensi |  | 200 orang | 575.000.000 | 110 orang | 750.000.000 | 240 orang | 1.800.000.000 |  | 3.125.000.000 |  |  |
|  |  |  | Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum |  |  |  | 2 dokumen | 120.000.000 |  |  |  | 120.000.000 |  |  |
|  |  |  | **Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional** | **Persentase Pelaksanaan Sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional** |  |  |  | 100% | 3.250.000.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional | Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Serta Jabatan Fungsional yang Disusun |  | 1 dokumen | 75.000.000 | 1 dokumen | 150.000.000 | 1 dokumen | 150.000.000 |  | 375.000.000 |  |  |
|  |  |  | Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi | Jumlah Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten/ Kota yang Terkelola dengan Baik |  | 1 lembaga | 152.287.000 | 1 lembaga | 200.000.000 | 1 lembaga | 200.000.000 |  | 552.287.000 |  |  |
|  |  |  | Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota | jumlah Peserta Uji Kompetensi dan Sertifikasi |  |  |  |  |  | 40 orang | 300.000.000 |  | 300.000.000 |  |  |
|  |  |  | Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar | Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar |  | 2 laporan | 235.000.000 | 1 laporan | 150.000.000 | 2 laporan | 300.000.000 |  | 685.000.000 |  |  |
|  |  |  | Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional | jumlah penyusunan standar perangkat pembelajaran pemerintah dalam negeri bagi pimpinan daerah, JPT dan jafung (penyusunan modul) |  |  |  |  |  | 1 dokumen | 150.000.000 |  | 150.000.000 |  |  |
| Mewujudkan Sumber Daya Aparatur yang kompeten | Meningkatkan kompetensi manajerial Aparatur |  | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan | Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan |  | 5 laporan | 1.371.892.000 | 5 laporan | 2.750.000.000 | 9 laporan | 4.280.000.000 |  | 8.401.892.000 |  |  |
|  |  |  | Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mewujudkan Sumber Daya Aparatur yang kompeten | Meningkat kan kompe tensi teknis fungsional, kompetensi sosio cultural dan kompetensi pemerintahan ASN |  | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi |  |  | 100% | 21.814.285.644 | 100% | 9.500.000.000 | 100% | 20.000.000.000 |  | 51.314.285.644 |  |  |
|  |  |  | Peningkatan Pelayanan BLUD |  |  |  | 21.814.285.644 |  | 9.500.000.000 |  | 16.500.000.000 |  | 47.814.285.644 |  |  |
|  |  |  | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan |  | 1 unit | 21.814.285.644 | 1 unit | 9.500.000.000 | 1 unit | 16.500.000.000 | 1 unit | 47.814.285.644 |  |  |
| **Total Anggaran** | | | | | | 100% | **41.684.705.644** | **100%** | **32.461.551.000** | **100%** | **47.003.210.000** |  | **121.149.466.644** |  |  |

**BAB VII**

**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolah data kinerjayang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertangungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Berdasarkan Tujuan dan Sasaran RPJMD telah ditetapkan indikator kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut:

**Tabel 7.1**

**Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Indikator** | **Kondisi Kinerja awal periode RPJMD** | **Target dan Capaian Setiap Tahun** | | | | | | | | | | **Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD** |
| **Tahun 2018** | **Tahun 2019** | | **Tahun 2020** | | **Tahun 2021** | | **Tahun 2022** | | **Tahun 2023** | |
| **Realisasi** | **Target** | **Realisasi** | **Target** | **Realisasi** | **Semula** | **Menjadi** | **Semula** | **Menjadi** | **Semula** | **Menjadi** |
| 1 | Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan manajerial | 75% | 80% | 80,45% | 85% | 83,6 | 90% | 87% | 92% | 88% | 95% | 90% | 90% |
| 2 | Persentase ASN yang telah mengikuti pengembangan kompetensi teknis dan fungsional, kompetensi sosio cultural dan kompetensi pemerintahan | 30% | 35% | 42,61% | 45% | 48,18 | 55% | 55% | 65% | 65% | 75% | 75% | 75% |

**BAB VIII**

**PENUTUP**

Pokok-pokok pikiran yang ada dalam penyusunan Renstra Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 berisikan rangkaian program dan kegiatan guna diimplementasikan oleh seluruh anggota organisasi dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang ada, yaitu faktor internal dan eksternal serta kondisi lingkungan BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan.

Sebagai tolak ukur dan sekaligus penuntun bagi segenap organisasi, maka kita perlu secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan kegiatan kediklatan dengan posisi serta peran yang diemban masing-masing.

Hal diatas menyadarkan kita bahwa Renstra Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan benar-benar didasarkan atas analisis yang akurat dengan melihat potensi yang ada sehingga wajar bila Renstra mengakomodir semua kepentingan organisasi yang ditetapkan secara bersama dan harus dipatuhi secara bersama-sama pula.

Demikian kiranya Renstra Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan ini dapat dipedomani dan bermanfaat bagi kita bersama.